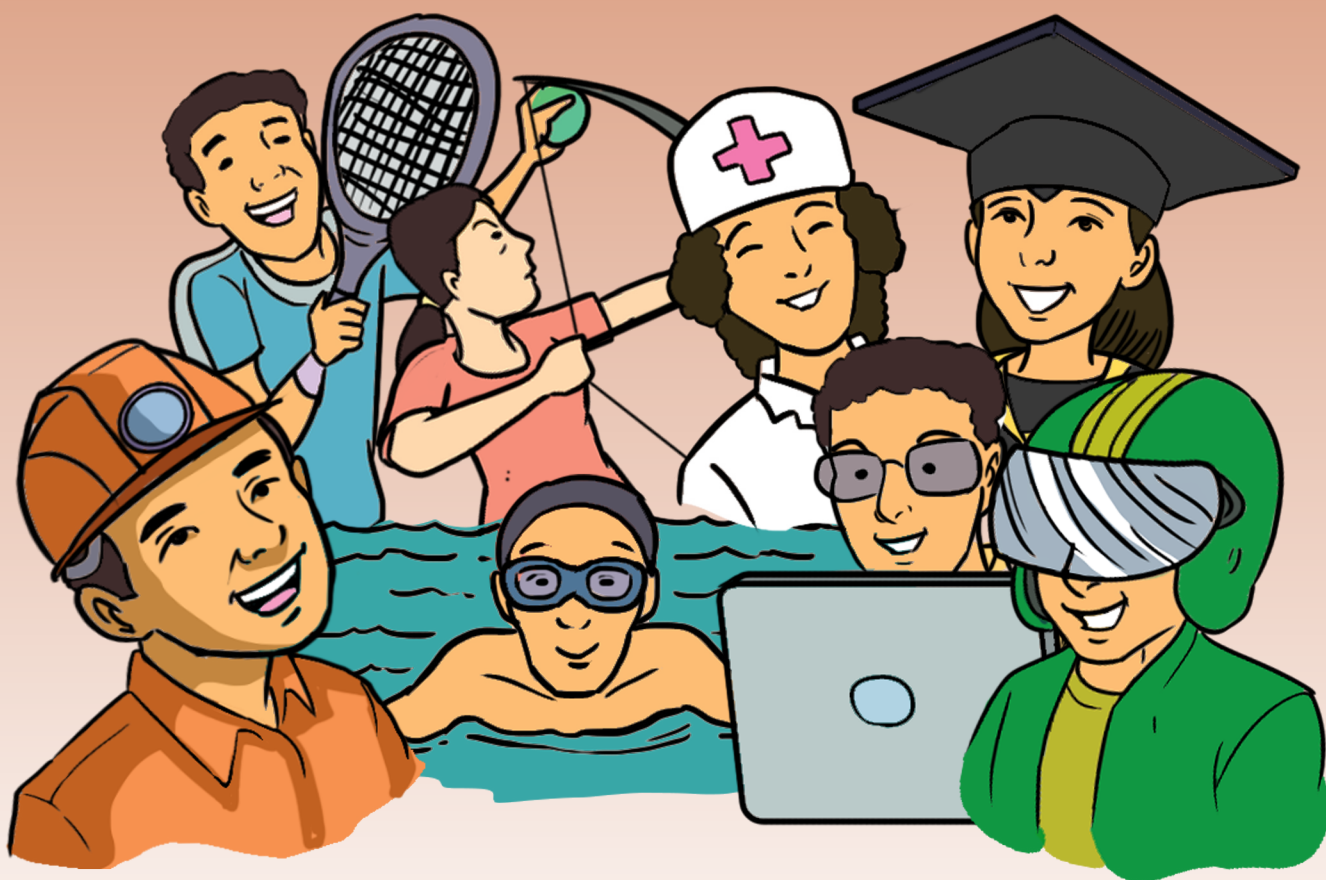


LAPORAN

SURVEY PERSEPSI WARGA MENGENAI PELAKSANAAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Tujuan 1. Penghapusan Kemiskinan, Tujuan 5. Kesetaraan Gender dan Tujuan 10. Penurunan Ketimpangan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Kabupaten Dompu, dan Kabupaten Timor Tengah Selatan



Jakarta, Oktober 2018

Didukung oleh:



European Union



Dokumen ini diterbitkan dengan dukungan dari Uni Eropa. Isi dari dokumen ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis, dan tidak mencerminkan pendapat dari Uni Eropa.

Dokumen ini diterbitkan dengan dukungan dari Uni Eropa. Isi dari dokumen ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis, dan tidak mencerminkan pendapat dari Kementerian Sosial Republik Indonesia

Dokumen ini diterbitkan dengan dukungan dari Uni Eropa. Isi dari dokumen ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis, dan tidak mencerminkan pendapat dari OXFAM.

Dokumen ini diterbitkan dengan dukungan dari Uni Eropa. Isi dari dokumen ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis, dan tidak mencerminkan pendapat dari Koalisi Perempuan Indonesia

LAPORAN

Survey Persepsi Warga Mengenai Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Tujuan 1.Penghapusan Kemiskinan, Tujuan
5.Kesetaraan Gender dan Tujuan 10.Penurunan
Ketimpangan di Kabupaten Pangkajene dan
Kepulauan, Kabupaten Dompu, dan Kabupaten Timor
Tengah Selatan

Oleh

Bagus Takwin dkk

JAKARTA
Oktober 2018

Daftar Isi

Ringkasan	iv
BAB 1. Pendahuluan	1
1.1. Latar belakang	1
1.2. Tujuan	3
1.3. Pertanyaan Utama	3
BAB 2. Kerangka Teoretik dan Metode	5
2.1. Urgensi Kesiapan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Pencapaian TPB	5
2.2. Metode	9
2.3. Teknik Analisis Data	10
BAB 3. Kesiapan Pemerintah Indonesia untuk Menjalankan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)	11
3.1. Kesiapan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia	11
3.2. Program Pengentasan Kemiskinan, Penurunan Ketimpangan Ekonomi dan Ketimpangan Gender	12
3.3. Kesiapan Pemerintah Daerah Kabupaten TTS, Kabupaten Dompu, dan Kabupaten Pangkep	15
BAB 4. Status Kemiskinan, Ketimpangan Ekonomi dan Ketimpangan Gender di Kabupaten Dompu, Timor Tengah Selatan, dan Pangkajene Kepulauan	19
4.1. Ketimpangan	19
4.2. Status Kemiskinan	21
4.3. Ketimpangan Gender	25
BAB 5. Kesimpulan dan Rekomendasi	30
5.1. Kesimpulan	30
5.2. Rekomendasi	31

Ringkasan

Di tahun 2018, INFID juga melakukan penelitian penilaian warga terhadap kesiapan pemerintah daerah dalam Pencapaian TPB di tiga daerah tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan metode survei menggunakan kuesioner. Dalam survei ini digunakan alat ukur Kesiapan Pemda dalam Pencapaian TPB yang mengukur penilaian warga mengenai program sosial dan kesiapan pemerintah daerah dalam pencapaian TPB.

Tujuan

Melanjutkan studi dan penelitian tahun 2017, pada tahun 2018 tujuan penelitian yang dilakukan INFID adalah sebagai berikut.

1. Mengetahui sejauh mana pemerintah daerah di Indonesia menjalankan program sosial dan upaya pencapaian TPB.
2. Menghasilkan alat advokasi pembangunan yang kuat di berbagai daerah di Indonesia.
3. Menghasilkan laporan pemantauan pembangunan yang reguler dan mudah dimengerti dan dipahami oleh publik, media massa dan pengambil kebijakan.
4. Menyediakan *feedback* dan evaluasi mengenai kinerja dan capaian kebijakan-program sosial dan upaya pencapaian TPB bagi pengambil kebijakan di nasional dan daerah mengenai kinerja serta capaian program sosial dan TPB.

1.3. Pertanyaan Utama

Masalah terkait kesiapan Pemda dalam pencapaian TPB diturunkan dalam lima pertanyaan berikut.

1. Sejauh mana Permerintah Pusat dan pemerintah daerah menjalankan program untuk pengentasan kemiskinan, serta mengurangi ketimpangan umum dan ketimpangan gender?
2. Bagaimana status kemiskinan, ketimpangan umum dan ketimpangan gender di daerah TTS, Dompu dan Pangkep?

Hasil

1. Tim pelaksana pencapaian TPB di Indonesia sudah terbentuk dan sedang dalam proses menjalankan tugas-tugasnya sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
2. Secara umum, program sosial yang ada di Indonesia belum memadai untuk mendukung pencapaian TPB. Pemerintah daerah dan Pemerintah Nasional masih dinilai belum melakukan langkah-langkah yang cukup untuk membantu warga miskin, menyediakan pekerjaan, membantu perempuan, dan membantu dalam menjalankan usaha.
3. Pemerintah daerah Kabupaten Pangkep sudah memulai persiapan pencapaian TPB, bahkan sudah menyediakan anggarannya dalam APBD dan sudah menjalankan beberapa program yang sejalan dengan pencapaian TPB dua tahun terakhir. Hasilnya, terjadi perubahan cukup signifikan pada penurunan ketimpangan, status kemiskinan, dan ketimpangan gender.
4. Masih seperti tahun 2017, Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu dan Kabupaten Timor Tengah Selatan belum memulai persiapan pencapaian TPB, dan belum menyediakan anggarannya dalam APBD.
5. Secara umum, program-program sosial yang diselenggarakan di Kabupaten Dompu dan Kabupaten Timor Tengah Selatan belum mendukung secara signifikan pencapaian TPB.
6. Status kemiskinan yang terburuk ada di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Penghasilan kebanyakan warganya lebih kecil dari UMP dan biaya yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar.
7. Dari tiga kabupaten yang diteliti, ketimpangan ekonomi yang paling tinggi terjadi di Kabupaten Timor Tengah Selatan, disusul oleh Kabupaten Dompu.
8. Dari tiga kabupaten yang diteliti, ketimpangan gender yang paling tinggi terjadi di Kabupaten Timor Tengah Selatan, disusul oleh Kabupaten Dompu.
9. Bentuk ketimpangan gender dan diskriminasi terhadap perempuan yang masih berlangsung adalah tindak kekerasan terhadap perempuan di ruang publik dan privat, eksploitasi perempuan, pernikahan paksa dan pernikahan anak/di bawah umur, dan sedikitnya perempuan yang menduduki jabatan publik.

Rekomendasi

Masih seperti yang diajukan pada 2017, Infid merekomendasi pokok-pokok usulan berikut ini untuk dijalankan oleh Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah guna meningkatkan kesiapan pencapaian TPB.

1. Pemerintah Indonesia harus melibatkan masyarakat untuk ikut serta dalam menyebar SDGs atau TPB. Kampanye besar TPB perlu dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan banyak warga. Kampanye itu perlu dilakukan oleh Pemerintah Indonesia di tingkat nasional, provinsi, kota/kabupaten, hingga kecamatan. Kampanye itu bertujuan memberikan pemahaman mengenai pentingnya Indonesia menjalankan SDGs karena masih banyak pihak di antara para pemangku-kepentingan yang memandang SDGs sebatas agenda internasional yang terpisah dengan dengan pembangunan nasional dan daerah.
2. Sosialisasi SDGs sebagai cara yang dapat didayagunakan sebagai kerangka kerja dan alat bantu untuk mengakselerasi capaian dan mempertanggungjawabkan hasil-hasil pembangunan nasional dan daerah.
3. Pencapaian TPB perlu didorong melalui kerjasama multi stake holders serta sinergi dari berbagai pemangku kepentingan mencakup pihak pemerintah nasional, pemerintah daerah, perguruan tinggi, sektor swasta/dunia usaha, CSO, ormas, dan kelompok masyarakat lainnya. Semua pemangku kepentingan ini perlu mengadopsi mindset atau “pola pikir baru” yang menerima keseimbangan yang lebih adil antara risiko dan imbalan dalam menjalankan program dan bekerja sama dalam jangka panjang.
4. Tindakan yang lebih terpadu di tingkat lokal diperlukan untuk menjalankan program yang benar-benar berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan, perluasan dampak melalui pengembangan praktik terbaik, serta template atau standar proyek, dan melakukan peningkatan kapasitas efektif sehingga program itu dapat dilaksanakan secara efektif.
5. Pasca-infrastruktur, fokus pembangunan perlu diarahkan pada pembangunan manusia dan kesejahteraan sosial.
6. Lakukan analisis kebutuhan program sosial terkait dengan pencapaian TPB untuk menentukan program apa yang perlu dilaksanakan dan bagaimana pelaksanaannya oleh Pemerintah Indonesia, baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota.
7. Standarisasi pelaksanaan program sosial, mencakup di antaranya prosedur operasional, durasi, frekuensi, besaran bantuan, proses pemberian bantuan, target penerima bantuan, pelaksana program, serta aktivitas pemantauan dan evaluasi.

8. Meningkatkan bimbingan dan upaya lainnya untuk meningkatkan jumlah perempuan dalam pekerjaan laki-laki dan posisi kepemimpinan politik dengan memberi penekanan khusus pada daerah-daerah yang ketimpangannya gendernya masih tergolong tinggi.
9. Memulihkan dan memberikan penekanan yang lebih atas pembangunan sumber daya manusia dan ketenagakerjaan
10. Realokasi dana 5-10% untuk meningkatkan investasi SDM perempuan dari anggaran pendidikan di APBN dengan memberi penekanan khusus pada daerah-daerah yang ketimpangannya ekonominya masih tergolong tinggi.
11. Memastikan menyempitnya kesenjangan antara daerah dalam pembangunan manusia dan memberikan kesempatan yang lebih besar untuk meningkatkan kualitas SDM bagi an kelompok masyarakat miskin.
12. Memperbaharui kebijakan pajak di Indonesia, sesuai dengan potensi ekonomi Indonesia dan prinsip pembagian beban dan manfaat yang adil.
13. Perbaiki Undang-Undang Perpajakan agar dapat mengakomodasi potensi pendapatan pajak dan realitas kekayaan kelompok super kaya Indonesia.
14. Pemantauan dan evaluasi sistematis pelaksanaan program-program pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan sosial (termasuk ketimpangan gender) secara komprehensif. Pemantauan dan evaluasi ini dilakukan mulai dari perencanaan hingga pengukuran hasil dan dampak. Evaluasi tidak hanya dilakukan pada akhir pelaksanaan program, melainkan perlu dilakukan dalam keseluruhan rentang pelaksanaan program, sejak awal, pertengahan hingga akhir program sehingga selain dapat menjadi masukan bagi pelaksanaan program berikutnya, juga menjadi dasar untuk perbaikan program yang sedang berlangsung.

BAB 1

Pendahuluan

1.1. Latar belakang

Komitmen Indonesia untuk ikut untuk melaksanakan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) diikuti oleh penentuan pengurangan ketimpangan, ketahanan pangan, dan pengentasan kemiskinan sebagai prioritas pembangunan oleh pemerintah Indonesia. Hingga tahun 2017, pada prakteknya kesiapan mencapai SDGs ini masih belum tampak kuat pada pemerintah Indonesia, khususnya pemerintah daerah kabupaten/kota. Diperlukan upaya keras untuk mendorong pemerintah daerah agar siap menjalankan program-program pencapaian SDGs.

Di tingkat nasional, Pemerintah Indonesia, sudah menunjukkan kesungguhan niat untuk menjalankan pencapaian SDGs yang dalam bahasa Indonesia disebut Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Seperti yang sudah diketahui luas, tiga hal yang dapat menjadi indikasi dari kesungguhan Pemerintah Indonesia. Pertama, pemerintah sudah membuat kerangka legalitas berupa Peraturan Presiden mengenai TPB. Kedua, secara substansial, 17 tujuan dalam TPB memiliki konkuensi dengan Nawacita Presiden Joko Widodo sehingga upaya-upaya pencapaian TPB menjadi program-program dalam RPJM bahkan sebagian telah menjadi program prioritas Pemerintah. Ketiga, sudah terbentuk Tim Pelaksana TPB di tingkat nasional.

Dalam Peraturan Presiden itu diatur perihal kerja sama dan kemitraan dalam pelaksanaan pencapaian TPB. Pencapaian TPB melibatkan partisipasi seluruh kelompok pemangku-kepentingan. Hingga saat ini masih dirumuskan oleh Pemerintah mekanisme dan prosedur kemitraan untuk pencapaian TPB yang melibatkan semua pemangku-kepentingan, yaitu Pemerintah Nasional, Pemerintah daerah, Perguruan Tinggi, sektor swasta/dunia usaha, CSO, Ormas, dan kelompok masyarakat lainnya.

Sampai 2017, niat yang kuat itu masih mendapat tantangan berat. Kondisi program sosial yang belum optimal, keadaan Indonesia yang memiliki banyak warga miskin, dan serapan pasar kerja terhadap tenaga kerja yang masih rendah menjadi persoalan besar yang harus diatasi oleh Pemerintah Indonesia. Untuk dapat mencapai TPB yang merupakan tujuan dan target yang berat, kondisi Indonesia masih belum mendukung. Peningkatan kuantitas dan kualitas Program sosial serta pembangunan manusia masih harus diupayakan dan perlu menjadi fokus pembangunan. Jika program sosial dan pembangunan manusia belum jadi prioritas, target-target TPB yang sudah dicanangkan akan tetap jauh dari realitas di Indonesia. Percepatan pembangunan sosial dan manusia perlu menjadi prioritas setelah pembangunan infrastruktur berlangsung di Indonesia.

Perlu diidentifikasi kondisi pelaksanaan program sosial di Indonesia untuk mengetahui seberapa jauh pencapaian Indonesia jika dibandingkan dengan target yang dicanangkan dalam TPB. Dengan pengetahuan itu, Pemerintah Indonesia dapat memperhitungkan dan mengantisipasi upaya-upaya apa saja yang diperlukan agar target-target TPB dapat tercapai. Berdasarkan data dan kajian-kajian yang dilakukan hingga awal tahun 2018, dipahami bahwa perlu terobosan-terobosan baru yang efektif untuk mengatasi kondisi itu. Cara dan gaya birokrasi lama harus ditinggalkan, diganti dengan cara dan gaya baru. Perubahan birokrasi dan pendekatan pembangunan diperlukan agar kondisi itu dapat diatasi dan pencapaian TPB menjadi mungkin terjadi di Indonesia.

Sampai pertengahan tahun 2018, TPB masih belum juga dikenal luas di masyarakat Indonesia. Kesadaran untuk mendukung pencapaian TPB belum tersebar di kalangan warga Indonesia. Sosialisasi TPB belum berlangsung memadai. Indonesia juga masih belum selesai menentukan cara dan metode yang memadai untuk mencapai TPB. Ini akan mempersulit Indonesia dalam pencapaian TPB. Kondisi ini juga terungkap melalui survei IBS.

Untuk menanggapi persoalan ini, INFID terlibat dalam upaya peningkatan kesiapan pemerintah daerah di Indonesia dengan melakukan studi yang mengidentifikasi sejauh mana kesiapan pemerintah daerah dalam pencapaian SDGs. Salah satu upaya itu adalah dengan melakukan studi untuk mengetahui kesiapan pemerintah daerah di beberapa wilayah di Indonesia. Sebelumnya, di tahun 2017, INFID mencermati kesiapan Pemerintah Daerah di Indonesia dalam pencapaian TPB melalui studi kualitatif dan penelitian kuantitatif berupa survey persepsi warga terhadap kesiapan pemerintah daerah. Studi itu berusaha mengetahui sejauh mana pemerintah

daerah memiliki kesiapan dalam pencapaian TPB, dan mengetahui status ketimpangan, kemiskinan, dan ketimpangan gender. Untuk mengetahui kesiapan pemerintah dan kondisi-kondisi tersebut, dilakukan survey di seluruh Indonesia dan secara khusus di tiga daerah, yaitu Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Kabupaten Dompu, dan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep). Tiga daerah ini masuk dalam kategori daerah tertinggal di Indonesia.

Di tahun 2018, INFID juga melakukan penelitian penilaian warga terhadap kesiapan pemerintah daerah dalam Pencapaian TPB di tiga daerah tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan metode survei menggunakan kuesioner. Dalam survei ini digunakan alat ukur Kesiapan Pemda dalam Pencapaian TPB yang mengukur penilaian warga mengenai program sosial dan kesiapan pemerintah daerah dalam pencapaian TPB. Perumusan metode, pelaksanaan survei serta pengolahan data serta pembuatan laporan akhir dilakukan oleh Tim Peneliti INFID dan dikoordinasi oleh Bagus Takwin.

1.2. Tujuan

Melanjutkan studi dan penelitian tahun 2017, pada tahun 2018 tujuan penelitian yang dilakukan INFID adalah sebagai berikut.

1. Mengetahui sejauh mana pemerintah daerah di Indonesia menjalankan program sosial dan upaya pencapaian TPB.
2. Menghasilkan alat advokasi pembangunan yang kuat di berbagai daerah di Indonesia.
3. Menghasilkan laporan pemantauan pembangunan yang reguler dan mudah dimengerti dan dipahami oleh publik, media massa dan pengambil kebijakan.
4. Menyediakan *feedback* dan evaluasi mengenai kinerja dan capaian kebijakan-program sosial dan upaya pencapaian TPB bagi pengambil kebijakan di nasional dan daerah mengenai kinerja serta capaian program sosial dan TPB.

1.3. Pertanyaan Utama

Masalah terkait kesiapan Pemda dalam pencapaian TPB diturunkan dalam lima pertanyaan berikut.

1. Sejauh mana Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah menjalankan program untuk pengentasan kemiskinan, serta mengurangi ketimpangan umum dan ketimpangan gender?
2. Bagaimana status kemiskinan, ketimpangan umum dan ketimpangan gender di daerah TTS, Dompu dan Pangkep?

BAB 2

Kerangka Teoretik dan Metode

2.1. Urgensi Kesiapan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Pencapaian TPB

2.1.1. Urgensi Kesiapan Pemerintah Pusat dan Daerah

Kesiapan pemerintah daerah Indonesia dalam pencapaian TPB sangat penting untuk keberhasilan pencapaian TPB. Pencapaian TPB merupakan agenda yang sangat penting untuk terlaksana mengingat Indonesia sudah memiliki komitmen untuk melaksanakan pencapaian SDGs. Komitmen Indonesia dalam pencapaian SDGs didasari beberapa hal salah satunya adalah sebagian tujuan yang tercakup dalam SDGs sudah menjadi prioritas pemerintah Indonesia sekarang, yaitu pengurangan ketimpangan, ketahanan pangan, dan pengentasan kemiskinan.

SDGs penting untuk Indonesia setidaknya terkait dengan tiga hal. Pertama, Indonesia dapat terdorong untuk menjalankan pembangunan yang inklusif dan melipatgandakan kekuatan untuk mengakselerasi pencapaian pembangunan berkelanjutan Paska-2015, melalui kemitraan antara pemerintah, masyarakat sipil, akademisi dan sektor swasta di berbagai tingkatan berdasarkan platform *co-governance* dan *co-creation*. Kedua, SDGs dapat menjadi kerangka kerja dan

alat bantu bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia untuk memperkaya, mempertajam, mendorong dan mempercepat pencapaian Nawacita dan tujuan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2019. Ketiga, SDGs dapat dimanfaatkan untuk mengakselerasi peran aktif dan opsi-opsi Indonesia dalam mewujudkan visi peradaban dunia baru sebagaimana tertuang dalam Deklarasi Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan.

Untuk dapat tercapainya SDGs diperlukan dukungan fasilitas dari berbagai pihak, mengingat masih kurangnya pemahaman di antara pemangku kepentingan mengenai posisi strategis SDGs dan relevansinya dengan agenda pembangunan nasional dan daerah. Pemerintah daerah sebagai penanggungjawab dan pelaksana pembangunan di daerah memiliki kewajiban untuk terlibat aktif dan intensif dalam pencapaian SDGs atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

2.1.2. Komitmen Politik

Komitmen politik dari pembuat kebijakan sangatlah penting dalam rangka mewujudkan pelaksanaan SDGs disemua daerah. Hal ini dikarenakan besarnya kekuatan dari komitmen politik yang dapat mengembangkan dan menjadikan suatu program lebih efektif untuk merespon suatu permasalahan yang hendak diatasi. Dasar ini pulalah yang menjadikan komitmen politik dari pemegang kebijakan menjadi penting untuk diukur. Bagaimana sikap serta tindakan yang dipilih mereka terkait isu SDGs.

Pada dasarnya terdapat beberapa cara yang bisa digunakan untuk meninjau seberapa besar komitmen politik dari pemegang kebijakan daerah terkait SDGs. Pertama adalah mengukur pernyataan yang disampaikan ke publik terkait keberpihakan dalam SDGs. Hal ini dapat diukur dari jumlah pernyataan yang disampaikan pada media, seminar, workshop sampai dengan visi dan misi yang diusung pemerintah daerah. Dengan mengkaji pernyataan yang beredar kita dapat melihat sejauh mana sikap pemegang kebijakan terhadap penerapan SDGs di daerahnya.

Kedua adalah dengan mengukur jumlah tindakan-tindakan yang berkaitan dengan SDGs. Tindakan yang dimaksud dalam indikator ini merujuk kepada pengalokasian sumberdaya yang dimiliki pemerintah daerah untuk menyukseskan ketercapaian SDGs. Bentuk dari pengalokasian ini dapat dilihat dari jumlah dana yang dialokasikan (APBD atau sumber dana lain), tercantumnya indikator-indikator SDGs dalam rencana strategis (RPJMD), kebijakan pendukung pelaksanaan SDGs (UU dan Perda), indikator program yang secara spesifik mencantumkan poin-poin SDGs sebagai tujuan jangka pendek dan adanya monitoring serta evaluasi untuk menjaga agar keberlanjutan dari program dapat terlaksana. Mengacu kepada metode pengukuran tersebut maka berikut adalah gambaran komitmen politik terkait SDGs dari pemegang kebijakan di 3 kabupaten.

2.1.3. Kemiskinan

Secara umum, kemiskinan adalah situasi serba kekurangan karena keadaan yang tidak dapat dihindari oleh seseorang dengan kekuatan yang dimilikinya. Kemiskinan dapat diartikan juga sebagai ketidakmampuan individu untuk memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan material maupun non-material. Dilihat dari aspek kualitas hidup, kemiskinan adalah standar tingkat hidup yang rendah karena kekurangan materi pada sejumlah atau golongan orang bila dibandingkan dengan standar kehidupan yang berlaku di masyarakat sekitarnya. Kemiskinan juga dapat diartikan sebagai ketidakmampuan seseorang atau rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Dalam kaitannya dengan kekuasaan, kemiskinan dapat dipahami sebagai ketidaksamaan kesempatan untuk memformulasikan kekuasaan sosial berupa asset, sumber keuangan, organisasi sosial politik, jaringan sosial, barang atau jasa, pengetahuan dan keterampilan, serta informasi.

Pengertian kemiskinan perlu dioperasionalisasi dalam rumusan definisi yang memungkinkan pengukuran terhadap kemiskinan. Dalam penelitian ini kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan kebutuhan dasar lainnya yang diukur dari sisi pengeluaran. Definisi ini sejalan dengan definisi yang digunakan Badan Pusat Statistik (BPS) hanya di tataran operasional sedikit berbeda, khususnya dalam mempertimbangkan perbedaan karakteristik pada beberapa kategori orang sehingga mereka memiliki kebutuhan dasar yang berbeda pula. Ketidakmampuan di sini diartikan sebagai penghasilan yang jumlahnya di bawah jumlah yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Selain itu, dalam penelitian ini juga diperbandingkan antara penghasilan dan upah minimum provinsi (UMP) untuk mengetahui status kemiskinan.

Dalam menentukan kebutuhan dasar dipertimbangkan struktur keluarga dengan melihat karakteristik orang yang tinggal bersama dalam satu rumah. Kebutuhan dasar dalam penelitian dihitung berdasarkan struktur keluarga dengan menimbang secara khusus siapa saja yang tinggal satu rumah dengan unit kebutuhan dasar per kategori anggota keluarga. Kategori anggota keluarga yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Perempuan hamil;
- b. Perempuan menyusui;
- c. Bayi (0-6 bulan);
- d. Bayi (7-12 bulan);
- e. Bayi (1-5 tahun);
- f. Anak perempuan (6-13 tahun);
- g. Anak laki-laki (6-13 tahun)
- h. Remaja perempuan (14-17 tahun);
- i. Remaja laki-laki (14-17 tahun);
- j. Dewasa perempuan sudah menikah (18-65 tahun);
- k. Dewasa perempuan belum menikah (18-65 tahun);
- l. Dewasa laki-laki sudah menikah (18-65 tahun);
- m. Dewasa laki-laki belum menikah (18-65 tahun);
- n. Lansia perempuan (>65 tahun)
- o. Lansia laki-laki (>65 tahun).

Pemaparan status kemiskinan dalam penelitian ini dilakukan dengan membagi tiga kelompok responden berdasarkan perbandingan antara penghasilan dan kebutuhan dasar. Tiga kelompok itu adalah (1) kelompok penghasilan yang jumlah uangnya lebih kecil dari jumlah uang yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar; (2) kelompok penghasilan yang jumlah uangnya setara dengan jumlah uang yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar; dan (3) kelompok penghasilan yang jumlah uangnya lebih besar jumlah uang yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar.

Selain diperbandingkan dengan kebutuhan dasar, di sini dilihat juga perbandingan antara penghasilan dan UMP. Berdasarkan perbandingan ini diperoleh tiga kelompok, yaitu adalah (1) kelompok penghasilan yang jumlah uangnya lebih kecil dari UMP; (2) kelompok penghasilan yang jumlah uangnya setara dengan UMP; dan (3) kelompok penghasilan yang jumlah uangnya lebih besar dari UMP.

2.1.4. Ketimpangan

Konsep ketimpangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah ketimpangan sosial, yang tidak hanya mencakup aspek ekonomi, melainkan juga aspek-aspek sosial lainnya. Ketimpangan sosial didefinisikan sebagai ketidakmerataan distribusi sumber daya dalam masyarakat. Konsep ketimpangan sosial dikembangkan untuk dapat memberikan gambaran perbedaan antara pendapatan rata-rata, dan apa yang didapatkan oleh orang miskin dan kaya atau kelompok-kelompok dalam masyarakat. Dengan konsep ketimpangan sosial dapat dikenali seberapa baik warga negara yang berbeda mendistribusikan atau berbagi pendapatan yang mereka peroleh.

Turner (1986, 34-35) mengidentifikasi empat jenis kesetaraan. Yang pertama adalah kesetaraan ontologis atau kesetaraan mendasar orang. Kedua, kesetaraan kesempatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Ketiga, kesetaraan kondisi di mana ada upaya untuk membuat kondisi kehidupan yang sama bagi kelompok-kelompok sosial yang relevan. Keempat ada kesetaraan hasil atau kesetaraan hasil.

Ketimpangan sosial dalam penelitian ini mencakup empat ketimpangan tersebut. Konsep ini mencakup juga ketimpangan ekonomi yang dikenali berdasarkan pengukuran pendapatan dan aset, mencakup tabungan, properti, tanah, dan lain-lain. Dalam konsep ini tercakup pula ketimpangan kesempatan (kapabilitas dasar: pendidikan, kesehatan) dan ketimpangan karena proses (demokrasi, kemampuan mengontrol sumber daya dan lingkungan). Ketimpangan sosial di sini juga mencakup ketimpangan yang dilihat dari sudut pandang kelembagaan atau institutional, distribusi peran dan dampak institusi politik dan institusi ekonomi dalam mendorong kemajuan dan kesetaraan, yang menjelaskan apakah institusi ekonomi dan politik yang ada di sebuah negara bersifat inklusif atau tidak.

2.1.5. Ketimpangan Gender

Dalam penelitian ini, ketimpangan gender didefinisikan sebagai ketidakseimbangan akses terhadap sumber-sumber yang langka dalam masyarakat antara perempuan dan laki-laki. Sumber-sumber yang langka itu mencakup barang-barang material, jasa yang diberikan orang lain, prestise, perawatan medis, otonomi pribadi, kesempatan untuk memperoleh pendidikan dan pelatihan, serta kebebasan dari paksaan atau siksaan fisik (Chafetz, 1991).

Ketimpangan gender dikenali dari bentuk perlakuan atau tindakan yang diarahkan kepada perempuan. Bentuk ketimpangan gender mencakup di antaranya subordinasi, marginalisasi, stereotip, beban ganda, dan kekerasan terhadap perempuan. Dalam praktiknya, setiap bentuk itu mencakup banyak perlakuan dan tindakan tidak adil yang semua merupakan wujud ketimpangan gender. Ketimpangan gender pada intinya merupakan semua tindakan diskriminasi berbasis gender. Gejala-gejala yang mengindikasikan ketimpangan gender di antaranya adalah kekerasan fisik dan/atau seksual terhadap perempuan oleh pasangan intim, perkawinan anak, praktik mutilasi dan pemotongan alat kelamin perempuan, jumlah rata-rata waktu yang dihabiskan untuk pekerjaan rumah tangga dan perawatan yang tidak dibayar lebih tinggi untuk perempuan daripada laki-laki, rendahnya partisipasi perempuan di parlemen, perempuan masih kurang terwakili dalam posisi manajerial, sedikitnya perempuan yang membuat keputusan sendiri mengenai hubungan seks konsensual dan penggunaan alat kontrasepsi, serta kurangnya layanan kesehatan untuk perempuan.

Persoalan ketimpangan gender menjadi masalah penting di Indonesia. Menurut Global Gender Gap Report yang disusun World Economic Forum, Indonesia adalah salah satu negara dengan tingkat gaji perempuan dan laki-laki yang cukup timpang. Indonesia berada di peringkat 51 dari 141 negara yang dikaji. Selisih gaji berdasarkan gender di Indonesia sampai angka 0,68, yang artinya perempuan cuma digaji 68 persen dari gaji laki-laki untuk pekerjaan yang sama. Ini merupakan indikasi dari masih adanya kesenjangan gender. Penanganan persoalan ketimpangan gender di Indonesia memerlukan kesiapan besar dan dalam rangka mencapai TPB perlu diketahui seberapa besar kesiapan Indonesia agar dapat direncanakan upaya-upaya untuk meningkatkannya.

2.2. Metode

Metode yang digunakan dalam studi ini adalah survey yang secara umum dilakukan di 34 Provinsi dan secara khusus dilakukan di Timor Tengah Selatan, Dompu dan Pangkep selama 2 bulan dengan perincian satu bulan untuk persiapan, dan pengambilan data lapangan dan satu bulan untuk pengolahan data, serta penulisan dan penyuntingan laporan. Survey dilakukan dengan menggunakan kuesioner terhadap warga. Dengan metode ini peneliti mengukur persepsi dan

penilaian warga mengenai kebijakan mengatasi kemiskinan, ketimpangan, kinerja pelayanan kesehatan, pasar kerja dan sebagainya yang dijalankan pemerintah nasional dan pemerintah daerah.

2.1.1. Jumlah Responden dan Teknik Sampling

Untuk survey nasional, jumlah responden mencakup 2041 orang. Mencakup responden di 34 provinsi di Indonesia. Sedangkan jumlah responden di tiga kabupaten yang diteliti secara khusus adalah 400 orang per wilayah, sehingga total responden di tiga wilayah adalah 1200 orang.

Teknik sampling yang digunakan adalah *multistage random sampling*, yaitu pengambilan sampel secara bertingkat, pertama dengan menentukan kelompok-kelompok sampel, kemudian sampel dipilih secara *random* dari kelompok-kelompok itu. *Multistage random sampling* seperti *cluster sampling*, tetapi melibatkan pemilihan sampel dalam *cluster* yang dipilih. Dengan teknik ini, pemilihan sampel dilakukan paling sedikit pada dua tahap (*stage*).

2.1.2. Penyusunan Instrumen Pengukuran

Instrumen yang digunakan dalam pengukuran kesiapan pemerintah melaksanakan pencapaian TPB sama dengan yang digunakan tahun 2017, yaitu alat ukur berupa skala dan kuesioner.

2.3. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan menggunakan perhitungan statistik untuk setiap variabel yang diukur dan diteliti. Teknik analisis data yang akan digunakan mencakup statistik deskriptif dan teknik analisis korelasional. Untuk melihat gambaran umum subjek penelitian dilakukan perhitungan persentase, rata-rata (*mean*) serta penyebaran usia dan jenis kelamin subjek melalui statistik deskriptif. Analisis data dari variabel-variabel yang menjadi komponen kesiapan pelaksanaan SDGs, statu kemiskinan, ketimpangan ekonomi dan ketimpangan gender, serta hubungan masing-masing terhadap variabel lain dilakukan dengan perhitungan *multiple correlation* dan *multiple regresion*.

BAB 3

Kesiapan Pemerintah Indonesia untuk Menjalankan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

Dalam bab ini dipaparkan hasil penelitian mengenai kesiapan Indonesia untuk menjalankan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Penjelasan mengenai kesiapan yang dipaparkan di sini didasari oleh persepsi dan penilaian warga.

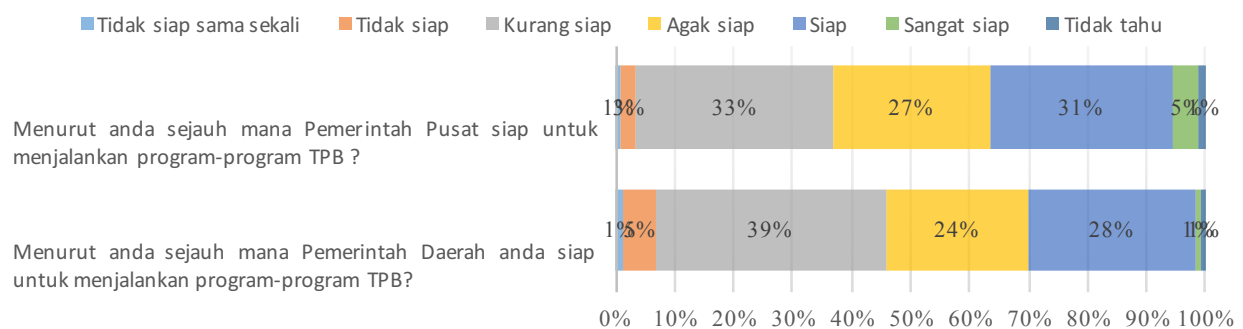
3.1. Kesiapan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia

Pada tahun 2018 terjadi kemajuan dalam kesiapan Pemerintah Indonesia melaksanakan pencapaian TPB, salah satunya adalah terbentuknya Tim Pelaksana Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) ditingkat nasional. Ini merupakan satu wujud penerapan PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 59 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN. Selain itu, sudah dibuat rencana aksi nasional untuk pelaksanaan pencapaian TPB.

Di tingkat provinsi dan kabupaten/kota persiapan pencapaian TPB belum merata. Tingkat kesiapan serta penyelenggaraan program TPB masih bergantung pada inisiatif kepala daerah masing-masing. Beberapa kabupaten/kota sudah menyelenggarakan program-program terkait TPB atas dasar inisiatif bupati/walikota masing-masing. Persiapan yang terencana dan sistematis di seluruh kabupaten/kota masih dalam proses dan diharapkan dapat segera terlaksana pada 2018. Bila dilihat secara keseluruhan, baru sedikit kabupaten/kota yang mulai menerapkan SDGs/TPB. Melalui survey ini Infid mencari tahu secara garis besar kesiapan di 34 provinsi melalui survey terhadap warga.

Dalam survey ini, Infid menanyakan kepada warga mengenai penilaian mereka terhadap kesiapan pemerintah pusat dan daerah untuk menjalankan usaha pencapaian TPB. Hasilnya menunjukkan hanya 36% responden yang menilai Pemerintah Pusat siap dan sangat siap menjalankan usaha pencapaian TPB. Sisanya menyatakan Pemerintah Pusat belum siap. Kebanyakan warga pun menilai pemerintah daerah belum siap. Hanya 29% responden menilai pemerintah daerah siap dan sangat siap.

Grafik 1. Kesiapan Pemerintah Pusat dan Daerah untuk Menjalankan Pencapaian TPB



3.2. Program Pengentasan Kemiskinan, Penurunan Ketimpangan Ekonomi dan Ketimpangan Gender

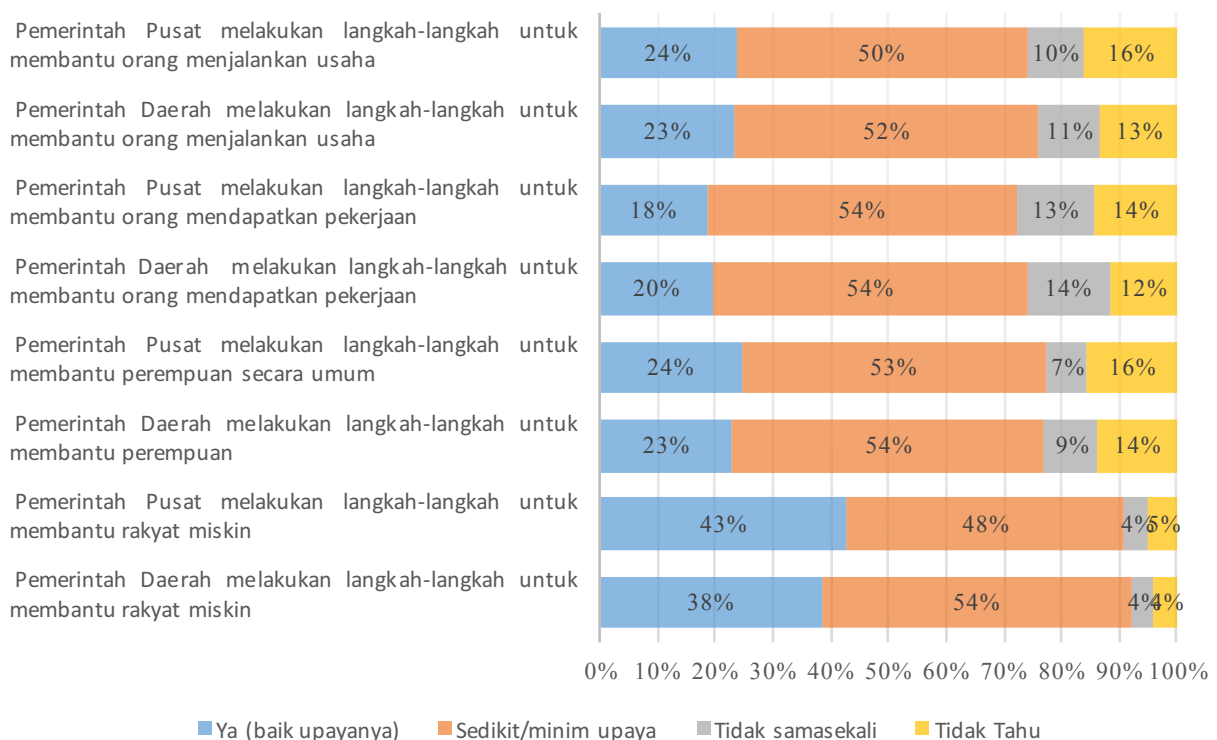
Untuk mengetahui kesiapan pencapaian TPB di Indonesia, INFID menggali pengetahuan warga mengenai program-program yang sejalan dengan upaya pencapaian TPB. Program-program itu mencakup program bantuan untuk orang miskin, program untuk pemberdayaan perempuan, serta program untuk mendapatkan pekerjaan dan bantuan usaha.

Hasil survey ini menunjukkan bahwa sebesar 64% responden mengetahui adanya program pemerintah daerah dan pemerintah pusat yang diselenggarakan khusus untuk bantuan usaha. Jumlah ini cukup besar, namun, masih banyak warga yang belum mengetahuinya. Sebanyak

36% warga tidak mengetahui keberadaan program-program itu. Ini mengindikasikan adanya kebutuhan untuk sosialisasi dan penyebaran informasi lebih luas kepada warga mengenai keberadaan program-program bantuan usaha yang diselenggarakan pemerintah daerah dan pemerintah nasional.

Hasil survey ini menunjukkan bahwa kebanyakan warga (91%) tahu bahwa pemerintah daerahnya menyelenggarakan program untuk membantu orang miskin dalam rangka pengentasan kemiskinan. Kebanyakan warga (92%) juga mengetahui bahwa pemerintah nasional menyelenggarakan program untuk membantu orang miskin. Selain kebanyakan warga mengetahui mengenai adanya program pemerintah daerah dan nasional menyelenggarakan program untuk orang miskin. Kebanyakan warga juga mengetahui bahwa pemerintah daerah menyelenggarakan program pengadaan pekerjaan untuk warganya. Kebanyakan dari mereka juga mengetahui mengenai program pengadaan pekerjaan yang diselenggarakan oleh pemerintah nasional.

Grafik 2. Pengetahuan mengenai program pemerintah daerah untuk orang miskin



Selama ini pemerintah, baik pemerintah nasional maupun pemerintah daerah sudah menjalankan program-program pengentasan kemiskinan, penurunan ketimpangan ekonomi dan ketimpangan gender. Usaha-usaha itu sejalan dengan pencapaian TPB. Meskipun demikian,

program-program itu masih dinilai kurang oleh kebanyakan warga. Masih banyak responden menilai pemerintah daerah mereka masih belum sepenuhnya melakukan langkah-langkah efektif untuk membantu rakyat miskin. Begitu juga dengan pemerintah nasional.

Penilaian yang serupa juga ditujukan kepada upaya pemerintah daerah dan pemerintah nasional dalam membantu perempuan. Masih banyak warga yang menilai usaha pemerintah masih minimum. Meski kecil persentasenya, masih ada warga yang mengaku tidak mengetahui adanya program dan langkah-langkah pemerintah membantu perempuan, baik yang dilakukan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah nasional.

Di bidang pekerjaan, kebanyakan warga juga menilai pemerintah sudah menjalankan langkah-langkah membantu warga memperoleh pekerjaan. Kebanyakan responden (78%) menilai pemerintah sudah menjalankan program membantu warga memperoleh pekerjaan. Penilaian serupa juga ditujukan kepada pemerintah nasional dalam hal membantu warga mendapatkan pekerjaan. Masih ada warga yang tidak tahu tentang program dan langkah-langkah pemerintah untuk membantu warga memperoleh pekerjaan.

Secara umum, program-program yang sudah dijalankan pemerintah dinilai warga masih kurang membantu mereka. Selain itu, masih banyak warga yang belum mengetahui tentang keberadaan program-program itu. Dengan kondisi seperti ini, program-program sosial yang dijalankan pemerintah dianggap masih belum memadai untuk dapat membawa Indonesia pada pencapaian TPB. Pemerintah Indonesia perlu meningkatkan kuantitas dan kualitas program sosialnya agar dapat mengejar pencapaian TPB pada tahun 2030. Meski tidak semua tujuan dalam SDGs menjadi prioritas, pencapaian tujuan prioritas memerlukan upaya yang lebih banyak dan lebih keras lagi. Tanpa peningkatan kuantitas dan kualitas program sosial, pencapaian TPB untuk tujuan prioritas tidak dapat dicapai pada tahun 2030. Menurut warga, diperlukan pendekatan, strategi, metode dan teknik baru untuk dapat melakukan pencapaian TPB sesuai dengan yang diharapkan.

Berdasarkan penilaian warga, belum semua sasaran SDGs diupayakan melalui program sosial. Program sosial yang ada belum memadai untuk pencapaian SDGs. Pemerintah daerah dan Pemerintah Nasional masih dinilai belum melakukan langkah-langkah yang cukup untuk membantu warga miskin, menyediakan pekerjaan, membantu perempuan, dan membantu dalam menjalankan usaha. Kesiapan Pemerintah Indonesia dalam pencapaian TPB masih rendah dan perlu ditingkatkan segera.

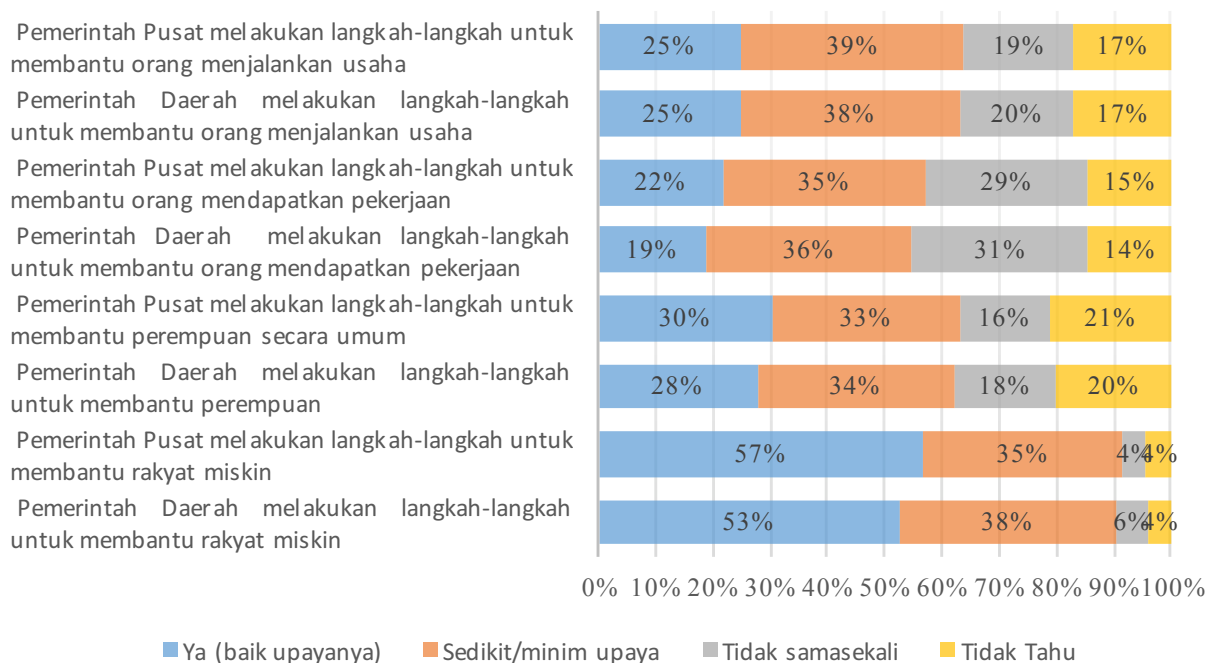
Jika keadaan ini tidak ditangani dengan pendekatan, strategi, metode dan cara baru yang dipikirkan secara khusus, maka sulit bahkan tidak mungkin pencapaian TPB dapat dilakukan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Pencapaian TPB membutuhkan pendekatan dan terobosan baru yang berintikan kerja sama seluruh pemangku-kepentingan di tingkat nasional dan daerah.

3.3. Kesiapan Pemerintah Daerah Kabupaten TTS, Kabupaten Dompu, dan Kabupaten Pangkep

Pemerintah daerah Kabupaten Pangkep sudah memulai persiapan pencapaian TPB, bahkan sudah menyediakan anggarannya dalam APBD dan sudah menjalankan beberapa program yang sejalan dengan pencapaian TPB. Pemerintah daerah Kabupaten Dompu dan Kabupaten Timor Tengah Selatan belum memulai persiapan pencapaian TPB, dan belum menyediakan anggarannya dalam APBD. Program yang ada terkait SDGs/TPB merupakan inisiatif dari masyarakat sipil melalui CSO.

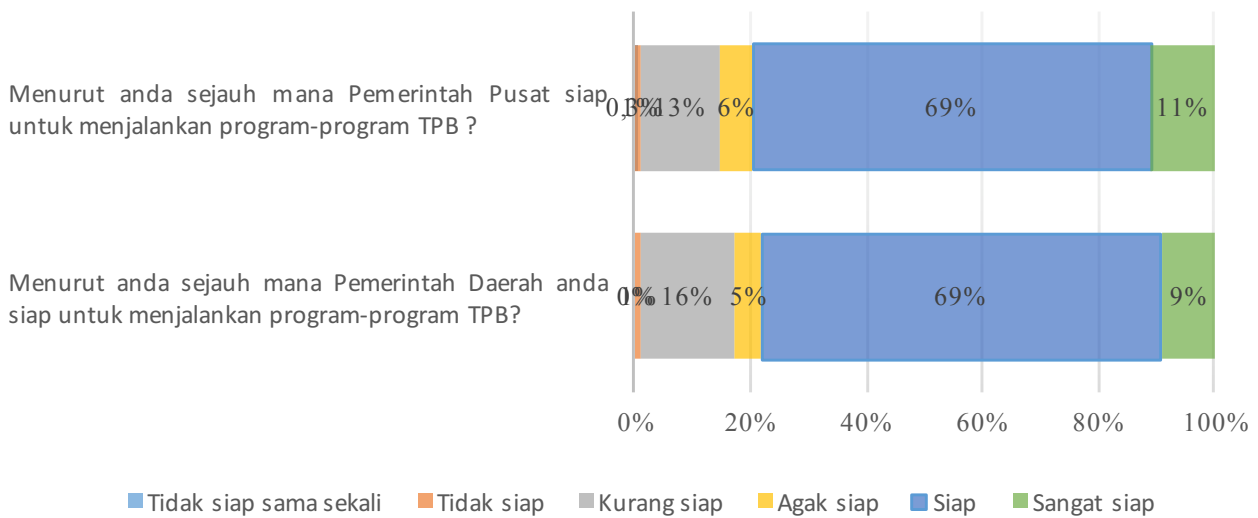
Secara umum, menurut warga program-program sosial yang diselenggarakan di Kabupaten Pangkep, Kabupaten Dompu, dan Kabupaten Timor Tengah Selatan belum sepenuhnya mendukung pencapaian SDGs/TPB. Masih warga menilai bahwa pemerintah hanya sedikit sekali atau bahkan tidak sama sekali menyelenggarakan program yang membantu warga mengentaskan kemiskinan. Masih banyak juga warga yang menilai pemerintah belum menyelenggarakan program yang membantu warga mendapatkan pekerjaan dan lapangan usaha. Begitu pula dalam hal membantu perempuan mengatasi ketimpangan gender, masih banyak warga yang menilai pemerintah belum menjalankan program-program yang membantu perempuan. Grafik 3 menggambarkan secara ringkas penilaian warga terhadap usaha pemerintah di daerah Kabupaten TTS, Kabupaten Dompu, dan Kabupaten Pangkep. Ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah di tiga kabupaten tersebut perlu melakukan upaya lebih banyak lagi guna meningkatkan kesiapan mereka untuk melaksanakan pencapaian TPB.

Grafik 3. Pengetahuan Warga TTS, Dompu, dan Pangkep mengenai Program Pemerintah Daerah Terkait TPB



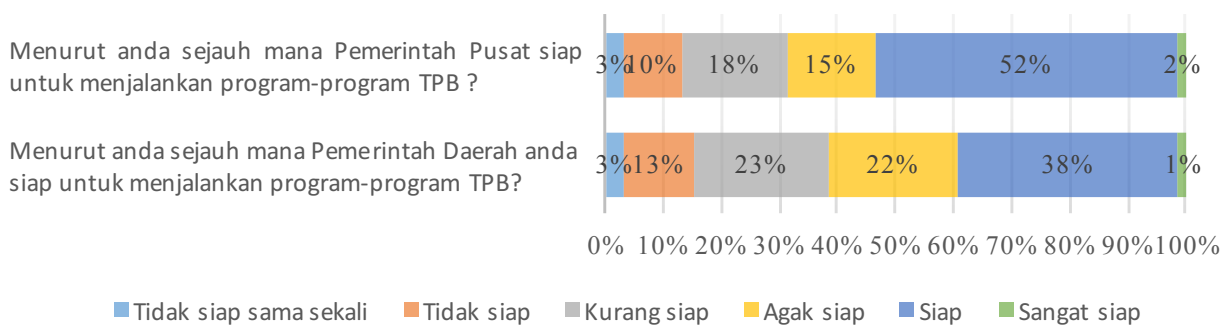
Di tiga kabupaten yang secara khusus diteliti, yaitu Kabupaten TTS, Kabupaten Dompu dan Kabupaten Pangket, cukup banyak warga menilai pemerintahnya siap untuk menjalankan program-program pencapaian TPB. Penilaian yang tinggi dari warga terhadap kesiapan pemerintah kabupaten mereka melaksanakan pencapaian TPB terjadi di Kabupaten TTS. Sebagian besar warga TTS (78%) menilai pemerintah mereka siap. Ini mengindikasikan adanya sikap positif dan optimisme warga terhadap pemerintah daerahnya. Sikap positif dan optimisme warga dapat menjadi modal bagi Pemda TTS untuk menjalankan program terkait TPB yang melibatkan masyarakat. Pemda TTS perlu memanfaatkan ini.

Grafik 4. Kesiapan Pemerintah Kabupaten TTS untuk Menjalankan Pencapaian TPB



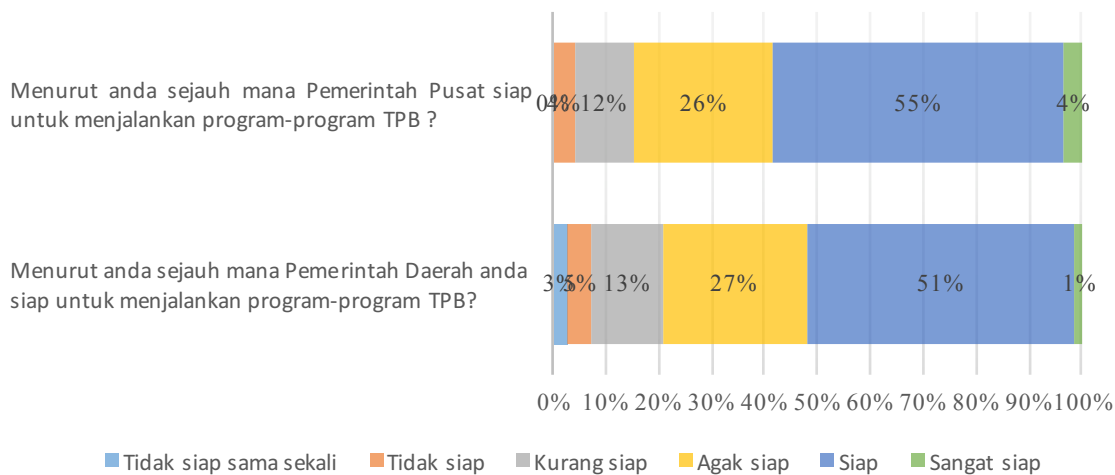
Kebanyakan warga Kabupaten Dompu menilai pemerintah daerah mereka belum siap melaksanakan pencapaian TPB. Hanya 39% responden yang menilai Pemda Dompu siap menjalankan pencapaian TPB. Ini perlu menjadi perhatian dan penting untuk ditindaklanjuti agar terjadi peningkatan kesiapan Pemda Dompu.

Grafik 5. Kesiapan Pemerintah Kabupaten Dompu untuk Menjalankan Pencapaian TPB



Di Kabupaten Pangkep sudah terlihat upaya-upaya signifikan dengan hasil yang signifikan pula dalam penilaian warga. Warga Pangkep menilai Pemerintah Kabupaten Pangkep sudah melakukan berbagai usaha dalam rangka pencapaian TPB. Lebih dari 50% warga menilai Pemerintah Kabupaten Pangkep siap untuk menjalankan pencapaian TPB. Sebanyak 27% responden menilai pemerintah agak siap untuk menjalankan pencapaian TPB. Pencapaian-pencapaian yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pangkep dirasakan oleh warga dan mendapatkan penilaian positif dari warga. Efeknya terasa pada pengurangan ketimpangan di Pangkep. Ini merupakan kemajuan bagi Pangkep dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Grafik 6. Kesiapan Pemerintah Kabupaten Pangkep untuk Menjalankan Pencapaian TPB



Komitmen politik untuk menjalankan usaha-usaha pencapaian TPB sudah ditunjukkan oleh pemerintah tiga daerah tersebut. Secara formal sudah ada pernyataan yang menegaskan komitmen pemerintah, baik dalam bentuk rumusan visi-misi, maupun pernyataan-pernyataan yang disampaikan ke publik. Dalam dokumen juga sudah mulai ada arahan bupati tiga daerah tersebut untuk pengadaan program-program terkait pencapaian TPB.

Perbandingan Komitmen Politik antara Tiga Kabupaten dapat diringkas dalam matriks komitmen politik kabupaten terhadap SDGs/TPB berikut ini. Kondisi ini masih sama dengan kondisi pada tahun 2017.

Dimensi	Komponen	Kabupaten Pangkep	Kabupaten Dompu	Kabupaten TTS
Pernyataan Publik tentang SDGs	Visi dan Misi	Belum secara jelas menargetkan pencapaian indikator SDGs	Belum secara jelas menargetkan pencapaian indikator SDGs	Belum secara jelas menargetkan pencapaian indikator SDGs
	Pernyataan di Seminar/ Workshop	Berencana mengadopsi indikator SDGs dalam pelaksanaan program pemerintah	Kepala Bappeda menyatakan mendukung dan akan memberikan perhatian penuh terhadap SDGs melalui pelibatan SKPD lain	Belum ada
Tindakan yang berkaitan dengan SDGs	APBD	Sudah ada anggaran untuk pokja SDGs	Belum ada alokasi khusus	Belum ada alokasi khusus
	RPJMD	Belum secara spesifik merujuk kepada SDGs	Belum secara spesifik merujuk kepada SDGs	Belum secara spesifik merujuk kepada SDGs
	UU dan Perda	Belum ada	Belum ada	Belum ada
	Indikator Program	Ada pembahasan tujuan-tujuan SDGs yang relevan dengan kondisi daerah	Belum ada	Belum ada
	Monitoring dan Evaluasi	Belum ada	Belum ada	Belum ada

BAB 4

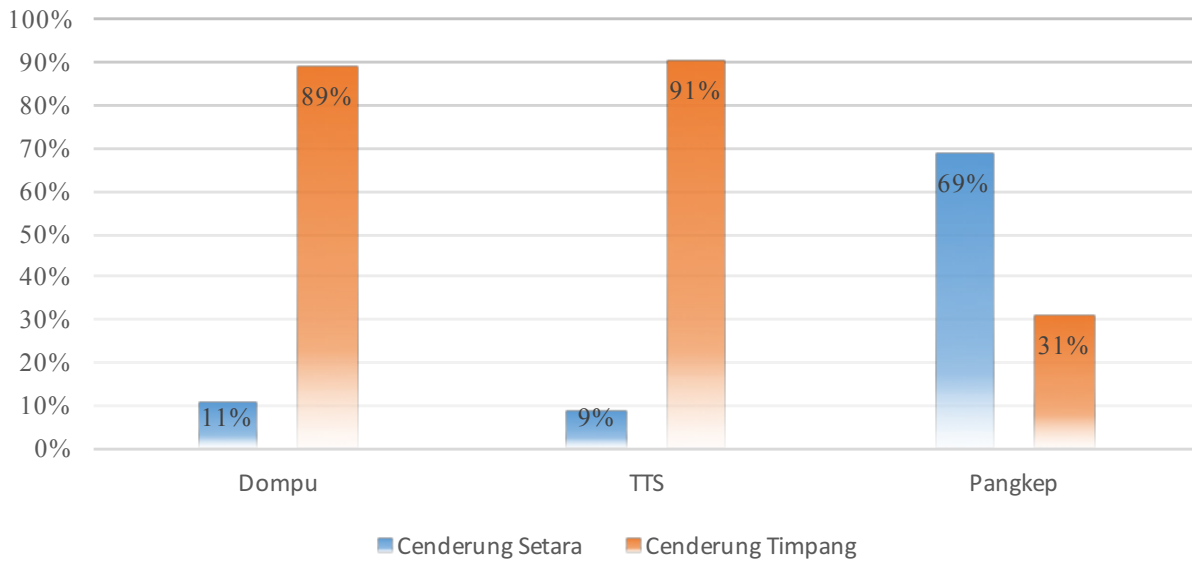
Status Kemiskinan, Ketimpangan Ekonomi dan Ketimpangan Gender di Kabupaten Dompu, Timor Tengah Selatan, dan Pangkajene Kepulauan

Dari survey terhadap warga yang dilakukan di Kabupaten Dompu, Kabupaten Pangkajene Kepulauan (Pangkep) dan Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) diperoleh gambaran ketimpangan, status kemiskinan, dan ketimpangan gender. Pada bab ini hasilnya dipaparkan dalam bentuk grafik.

4.1. Ketimpangan

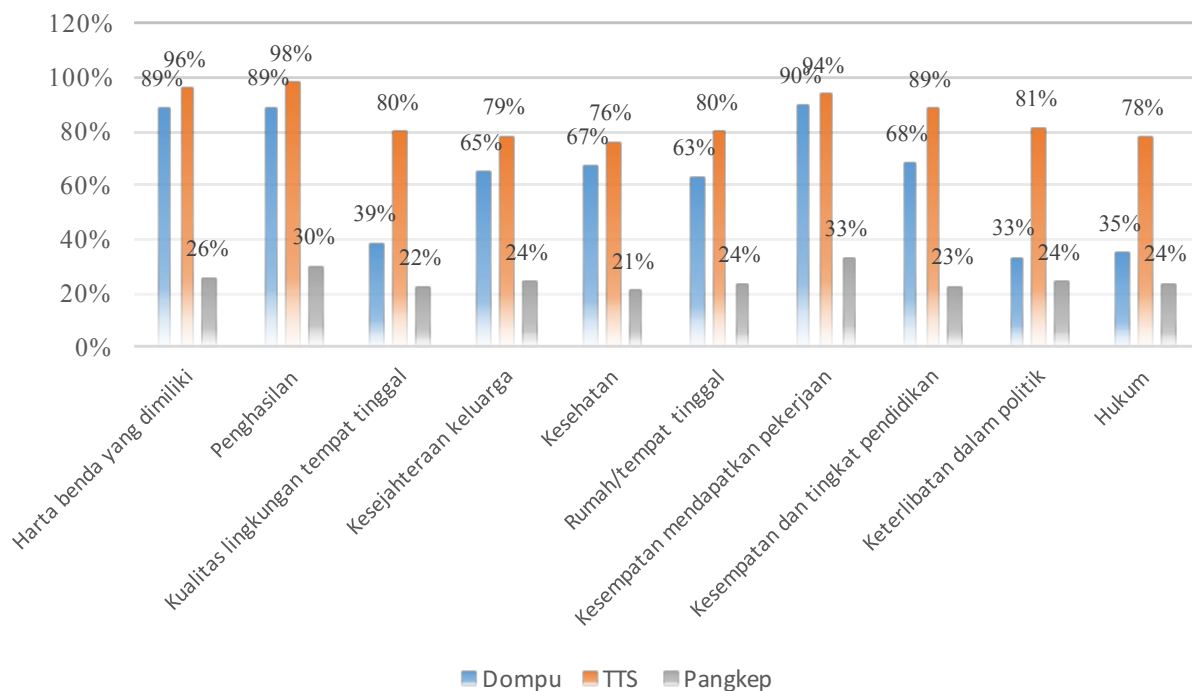
Warga di Kabupaten TTS, Kabupaten Dompu, dan Kabupaten Pangkep menilai ketimpangan masih berlangsung di daerah mereka. Kebanyakan warga di TTS (91%) dan Dompu (89%) menilai masih terjadi ketimpangan dengan derajat yang tinggi. Sedangkan di Pangkep, hanya 31% responden yang menilai masih terjadi ketimpangan di daerahnya.

Grafik 7. Penilaian Warga Mengenai Ketimpangan di 3 Wilayah



Ranah apa saja yang timpang? Seberapa jauh ketimpangannya? Ranah yang dinilai paling timpang adalah penghasilan, kepemilikan harta benda, dan pekerjaan, terutama di Kabupaten TTS dan Kabupaten Dompu. Di Kabupaten Pangkep, tingkat ketimpangan dinilai rendah oleh warga.

Grafik 8. Ranah yang Timpang di 3 Wilayah



Dari hasil pengukuran persepsi mengenai ketimpangan, diketahui bahwa wilayah yang paling dinilai timpang oleh warganya adalah Kabupaten TTS, lalu Kabupaten Dompu di tempat kedua. Kabupaten Pangkep dinilai tidak terlalu timpang, bahkan tingkat ketimpangannya di bawah tingkat ketimpangan nasional.

4.2. Status Kemiskinan

Seperti yang sudah dikemukakan terdahulu, pengertian kemiskinan dioperasionalisasi menjadi ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan kebutuhan dasar lainnya yang diukur dari sisi pengeluaran. Ketidakmampuan di sini diartikan sebagai penghasilan yang jumlahnya di bawah jumlah yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Selain itu, dalam penelitian ini juga diperbandingkan antara penghasilan dan upah minimum provinsi (UMP) untuk mengetahui status kemiskinan.

Pemaparan status kemiskinan dalam penelitian ini dilakukan dengan membagi tiga kelompok responden berdasarkan perbandingan antara penghasilan dan kebutuhan dasar. Tiga kelompok itu adalah (1) kelompok penghasilan yang jumlah uangnya lebih kecil dari jumlah uang yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar; (2) kelompok penghasilan yang jumlah uangnya setara dengan jumlah uang yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar; dan (3) kelompok penghasilan yang jumlah uangnya lebih besar jumlah uang yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Secara operasional, di sini digunakan perbandingan antara penghasilan dan UMP. Berdasarkan perbandingan ini diperoleh tiga kelompok, yaitu adalah (1) kelompok penghasilan yang jumlah uangnya lebih kecil dari UMP; (2) kelompok penghasilan yang jumlah uangnya setara dengan UMP; dan (3) kelompok penghasilan yang jumlah uangnya lebih besar dari UMP.

Hasil survey ini menunjukkan kebanyakan warga Kabupaten TTS dan Dompu memiliki penghasilan lebih kecil dari UMP. Sebanyak 78% responden di TTS menyatakan penghasilan mereka di bawah UMP, sementara 56% responden di Dompu menyatakan penghasilan mereka di bawah UMP. Mereka dapat digolongkan sebagai warga miskin karena UMP dihitung berdasarkan kebutuhan dasar di daerah mereka. Penghasilan lebih kecil dari UMP berarti tidak atau kurang mampu memenuhi kebutuhan dasar. Artinya orang dengan penghasilan lebih kecil dari UMP adalah orang yang tidak atau kurang mampu memenuhi kebutuhannya, dengan demikian mereka tergolong miskin. Status kemiskinan di TTS dan Dompu tergolong buruk dan mengkhawatirkan. Diperlukan dorongan segera agar usaha lebih keras dilakukan baik oleh Pemda TTS dan Dompu, juga Pemerintah Pusat. Usaha mengentaskan kemiskinan sangat diperlukan segera di dua kabupaten ini.

Untuk memberikan gambaran mengenai kemiskinan di Kabupaten TTS, perlu dipaparkan kondisi di sana. Banyak wilayah yang penduduknya mengalami kelaparan pada rentang waktu

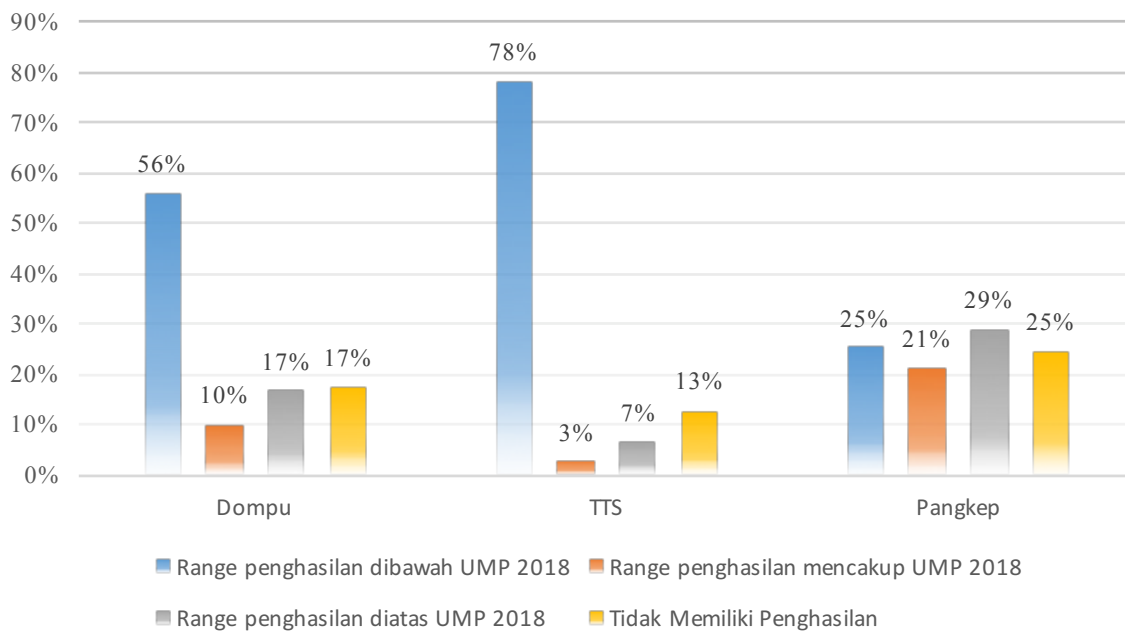
tertentu setiap tahunnya. Kondisi kekurangan makanan atau kelaparan, juga kekurangan air, sudah dianggap biasa di beberapa wilayah bagian TTS.

Kabupaten TTS adalah salah satu pengirim TKI terbanyak. Walaupun secara budaya pencari nafkah utama adalah laki-laki, namun ketika berbicara tentang siapa yang lebih tepat untuk bekerja keluar daerah, maka mereka akan jawab perempuan. Calo TKI di Soe menggunakan berbagai pendekatan untuk membujuk orang agar mau menjadi TKI. Seperti dijanjikan gaji besar, dan keluarga yang ditinggalkan diberi uang. Calo TKI sering melakukan pendekatan dari figur laki-laki seperti Bapak atau Om yang secara budaya memiliki kekuatan dalam mengambil keputusan keluarga. Banyak sekali kasus pengiriman TKI dari Soe melalui cara yang illegal. Secara tidak langsung perempuan dijadikan komoditas ekonomi untuk mendapatkan penghasilan keluarga. Laki-laki di Soe mayoritas menggantungkan ekonomi mereka dari pertanian. Namun pola perubahan iklim yang terjadi saat ini, tidak diikuti dengan pengetahuan masyarakat yang harusnya beradaptasi dengan perubahan ini.

Seringkali terjadi gagal panen di TTS karena tidak memperhitungkan ulang perubahan ini. Para petani di daerah tersebut masih menggunakan perhitungan bintang, dan tanda-tanda alam lainnya untuk menentukan masa tanam. Namun yang terjadi mereka tetap gagal panen. Mereka tidak mampu memperhitungkan perubahan lain yang tidak diajarkan oleh pendahulu mereka. Hal yang umum, ketika gagal tanam karena menanam berdasarkan pengetahuan sebelumnya, mereka tidak mau menanam kembali karena takut gagal. Oleh karena itu, banyak lahan yang ditinggalkan. Muncul pola migrasi pada masa kemarau, dimana laki-laki banyak yang bekerja menjadi *non-skilled labor* di kota. Sedangkan perempuan menjadi TKI. Sisanya bekerja sebisanya dengan penghasilan yang kecil dan jauh di bawah UMP.

Kemiskinan di TTS adalah kemiskinan yang berwajah perempuan. Penguatan pada perempuan dapat membantu mengurangi kemiskinan di TTS. Dapat diamati pada aktivitas ekonomi rumah tangganya. Perempuan sering dijumpai menjadi ujung tombak ekonomi keluarga. Kemiskinan di TTS juga terkait dengan budaya. Budaya “menurut” dan “patuh” pada otoritas membuat masyarakat TTS dalam kondisi yang mandeg. Perubahan sangat tergantung dari figur atau tokoh pemimpinnya. Masalah kemiskinan juga perlu dibebankan pada pemerintah pusat dimana bentuk bantuan sosial yang diberikan perlu memperhatikan pola dan tatanan masyarakat yang dibantu. Satu contoh kasusnya, ketika beras miskin (*raskin*) dibagikan pada masyarakat di TTS. Sebenarnya masyarakat punya asset untuk memenuhi kebutuhan pangannya. Kebiasaan sebelumnya yang mengkonsumsi jagung atau ketela, dengan adanya *raskin* menjadi berubah.

Grafik 9. Perbandingan penghasilan dengan UMP di 3 Wilayah



Di Dompu kemiskinan cukup menonjol. Ini dapat terlihat dari karakteristik wilayahnya. Kabupaten Dompu memiliki lahan kering dengan banyaknya bebatuan sisa erupsi yang relatif cukup besar dan menyebar di setiap daerah. Pemandangan kontur tanah yang berbukit-bukit dengan beberapa pepohonan kering yang menyebar hampir di setiap mata memandang: kering, gersang dan tentu saja terik matahari terasa di permukaan kulit. Di musim panas air sulit didapatkan. Dengan jumlah mata air yang terbatas, sungai-sungai pun tampak surut, bahkan hanya bebatuan saja yang tampak mengisi aliran sungai. Beberapa daerah memiliki kedalaman yang berbeda untuk mengakses air tanah, terutama daerah-daerah di bukit. Mulai dari 10 meter hingga paling dalam yang peneliti temui 100 meter di kecamatan Manggalewa. Biaya penggalian sumur mulai dari 2 juta hingga ratusan juta.

Masih banyak masyarakat kabupaten Dompu yang membuang hajat di kebun ataupun sungai. Walaupun pemerintah daerah sudah membuatkan WC komunal dan sukses di beberapa wilayah, namun ketersediaan air yang terbatas di WC pada beberapa daerah menjadikan masyarakat masih sulit untuk merubah kebiasaannya.

Dengan kondisi alam yang menantang seperti ini masyarakat yang mayoritas berprofesi sebagai petani kesulitan untuk berkembang karena mahalnya biaya produksi dikala musim panas. Mereka pun berpikir bahwa dalam kondisi ini mereka butuh tambahan modal. Berbagai cara pun mereka tempuh untuk keluar dari lingkaran kemiskinan dan mendapatkan modal. Mulai dari menjadi TKW/TKI ke berbagai negara, meminjam uang ke Bank dan rentenir untuk modal usaha hingga mengupayakan agar anaknya dapat bergelar sarjana dengan harapan memiliki nasib yang lebih baik.

Bagi mereka yang memiliki lahan pertanian meminjam kepada bank atau rentenir menjadi solusi yang dilakukan untuk mendapatkan modal untuk berusaha. Dari hasil penelusuran peneliti ditemukan bahwa bunga rentenir semakin besar pada daerah yang sumur airnya 100 meter. Walaupun dibayar ketika panen, bunga peminjaman bisa dua kali lipat jumlah uang yang dipinjam. Bunga ini semakin rendah pada daerah yang memiliki akses air yang lebih mudah. Adapun alasan masyarakat yang masih menggunakan jasa rentenir adalah lamanya proses pencairan uang oleh bank. Mereka mengaku, butuh waktu kurang lebih 1 sampai 2 bulan untuk pencairan dana. Sedangkan melalui rentenir mereka bisa mendapatkan dana hari itu juga.

Dari segi pengelolaan keuangan memang kemampuan masyarakat dalam mengelola keuangan masih rendah. Hal ini juga didukung oleh temuan peneliti bahwa uang hasil panen cepat habis. Baik itu untuk pengeluaran sekolah atau membeli barang konsumtif tanpa menyisihkan untuk modal tanam musim selanjutnya. Sehingga tidak aneh pada bulan Juni-Agustus (pasca panen) setiap tahunnya bagian data BPS Kabupaten Dompu mengatakan angka kemiskinan meningkat. Faktor lain yang memengaruhi meningkatnya angka kemiskinan pada bulan tersebut adalah pergantian musim dari hujan ke musim panas.

Berbeda halnya dengan mereka yang tidak memiliki tanah atau lahan pertanian. Untuk keluar dari lingkaran kemiskinan mereka berbondong-bondong pergi merantau ke luar daerah dan luar negeri. Baik itu sebagai Asisten Rumah Tangga (ART), pegawai perkebunan, buruh pabrik dan bidang lainnya melalui jalur resmi dan tidak resmi dengan rentang pendapatan 3-7 juta setiap bulannya. Dalam kasus ini setiap agen penyalur baik resmi maupun tidak resmi memiliki "sponsor" atau petugas yang merekrut warga dengan menawarkan iming-iming kehidupan indah ketika menjadi TKI. Biasanya mereka yang berada di kawasan tertinggal dengan ekonomi lemah menjadi sasaran empuk mereka.

Menurut pengakuan salah satu pemilik agen penyalur TKI yang peneliti temui, sudah hampir ribuan orang yang ia berangkatkan sejak tahun 1998. Baik cara resmi maupun tidak resmi setiap TKI mendapatkan potongan gaji mulai dari 30 - 50% setiap bulannya hingga paling lama satu tahun. Mereka yang berangkat ada yang berhasil memiliki modal/ aset ada pula yang gagal. Mereka yang gagal dipengaruhi oleh beberapa faktor. Sebut saja karena gajinya tidak dibayarkan oleh majikan, kabur sebelum kontrak selesai, uang yang dikirim kepada suami/istri di daerah disalahgunakan untuk berselingkuh dan foya-foya. Sehingga tidak dapat dipungkiri kepergian Suami/Istri selama berbulan-bulan memicu masalah lain seperti kondisi anak yang ditinggalkan, suami yang berselingkuh dan pemanfaatan dana kiriman yang kurang efektif.

Di Pangkep, hanya 25% responden yang menyatakan penghasilan mereka di bawah UMP. Ini pun sebenarnya masih tergolong besar, namun jika dibanding dengan dua kabupaten lainnya jadi tampak kecil. Jumlah ini perlu mendapatkan perhatian dan usaha untuk menguranginya. Seperempat warga yang miskin dari keseluruhan masyarakat masih tergolong tinggi dan memerlukan penanganan segera. Tanpa mengurangin nilai usaha Pemda Pangkep yang sudah

berusaha mengurangi kemiskinan di daerahnya, dorongan agar usaha lebih keras dilakukan baik oleh Pemda Pangkep maupun Pemerintah Pusat tetap sangat diperlukan.

Sudah ada upaya Pemda Pangkep dalam menangani masalah kemiskinan. Program-program itu adalah pemberian bantuan dari ADD (Anggaran Dana Desa) berupa alat-alat nelayan seperti kapal *jalloro'*, kapal sampan, mesin motor untuk kapal, jaring ikan/pukat dll. Bantuan ini penting dan sangat berguna bagi warga karena aset yang paling berharga yang dimiliki oleh warga Kepulauan di Pangkep adalah perahu. Namun, bantuan itu dirasakan oleh warga masih kurang efektif. Memang dengan adanya bantuan itu para nelayan relatif merasa terbantu namun dampak yang dirasakan tidak begitu besar mempengaruhi peningkatan pendapatan dari para nelayan. Keluhan utama yang mempengaruhi menurunnya pendapatan dari para nelayan, salah satunya di Pulau Sabutung, adalah maraknya terjadi kegiatan *illegal fisihing* khususnya *destructive fishing*. *Destructive fishing* adalah penangkapan ikan menggunakan alat tangkap terlarang atau kegiatan penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan, seperti pengeboman ikan, pembiusan/racun ikan dan pukat harimau. Penangkapan ikan dengan cara tersebut menimbulkan banyak kerugian, salah satu di antaranya adalah berdampak kepada menurunnya hasil pendapatan para nelayan di masa yang akan datang atau jangka panjang. Meski diketahui oleh warga siapa pelakunya, namun warga tidak bisa berbuat apa-apa, sebab mereka merasa tidak punya otoritas dan kewenangan untuk menegur dan melarang si pelaku.

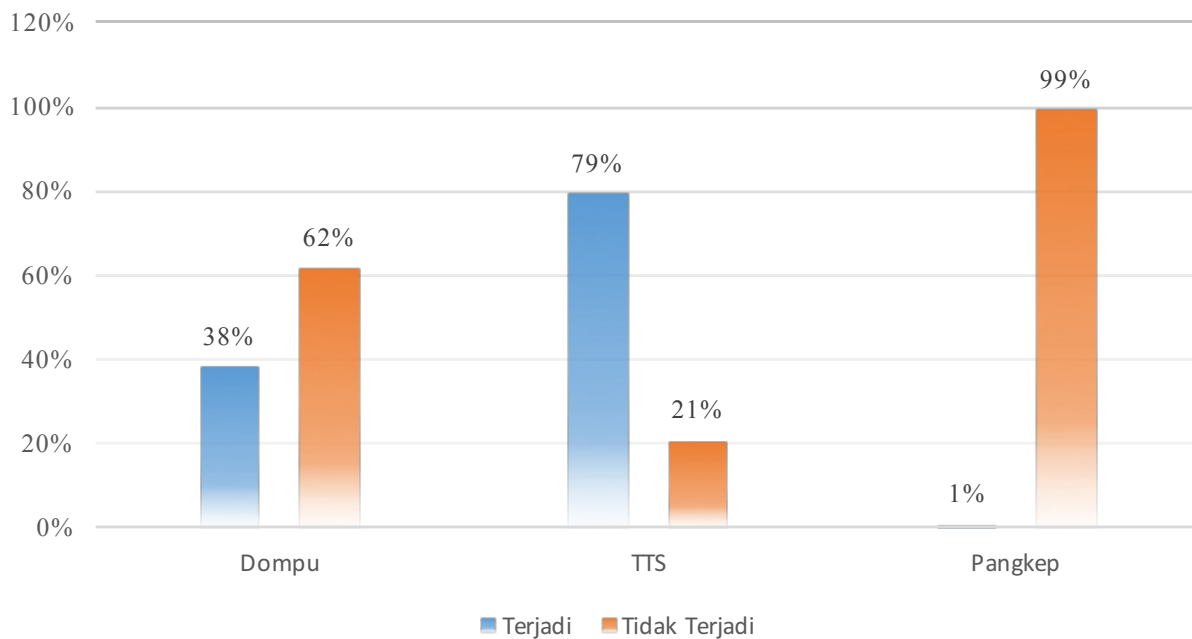
Akses kesehatan dan pendidikan di Pangkep dinilai memuaskan. Dalam dua tahun terakhir, ada peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dulu pelayanan dan obat-obatan kurang bagus, sementara sekarang Puskesmas siap melayani warga 24 jam dan kualitas obat-obatan dirasakan sudah bagus. Setiap desa juga difasilitasi oleh Pemerintah Desa sebuah Kapal Perahu Ambulance, masing-masing satu unit setiap desa, yang siap sedia selama 24 jam untuk mengantar pasien yang butuh dirujuk dari Puskesmas pulau ke Rumah Sakit Umum di Kota Pangkep.

Dari hasil pengukuran penghasilan yang dibandingkan dengan UMP dan kebutuhan dasar, diketahui bahwa wilayah yang paling banyak memiliki warga miskin adalah Kabupaten Timor Tengah Selatan, lalu Kabupaten Dompu di tempat kedua. Kabupaten Pangkep yang paling sedikit memiliki warga miskin di antara tiga kabupaten tersebut.

4.3. Ketimpangan Gender

Dari hasil pengukuran persepsi mengenai ketimpangan gender, diketahui bahwa wilayah yang paling dinilai timpang oleh warganya adalah Kabupaten Timor Tengah Selatan, lalu Dompu Selatan di tempat kedua. Hanya sedikit sekali warga Kabupaten Pangkep yang menyatakan ada ketimpangan gender, kebanyakan menyatakan tidak terjadi ketimpangan gender.

Grafik 10. Ketimpangan anatar perempuan dan laki-laki



Kondisi ketimpangan gender di TTS secara langsung dan tidak langsung terkait dengan kondisi ekonomi yang selanjutnya juga mempengaruhi kondisi pemenuhan nutrisi dan kondisi kesehatan perempuan. Risiko kematian ibu melahirkan di TTS relatif tinggi. Hal ini terkait dengan tiga faktor, yaitu di “rumah”, di “jalan”, dan di rumah sakit. Faktor pertama, rumah, terkait dengan budaya, adat dan kebiasaan di masyarakat NTT dimana pengambilan keputusan hanya berada pada pihak suami atau om. Ketika seorang ibu sudah saatnya melahirkan, namun di antara kedua orang laki-laki itu belum ada, maka akan sulit memutuskan tempat melahirkan, apakah di rumah atau di fasilitas kesehatan. Walaupun dalam situasi kritis.

Mayoritas kematian ibu melahirkan di TTS karena pendarahan. Menurutny hal ini disebabkan oleh penanganan yang terlambat pada situasi kritis. Tingginya kasus kematian ibu melahirkan juga terkait dengan kondisi jalan dan sarana transportasi yang belum layak. Membutuhkan waktu tempuh yang cukup lama untuk beberapa desa untuk mencapai fasilitas kesehatan umum. Pada proses realisasi program kesehatan ibu dan anak (KIA), semua proses kelahiran harus dilakukan oleh dokter. Namun, tidak selalu ada dokter di puskesmas. Selain itu alat medis dan obat-obatan yang tidak selalu siap juga menjadi kendala dalam penanganan ibu melahirkan.

Isu *trafficking* juga mencuat di TTS, terutama perdagangan perempuan. Banyak perempuan menjadi TKI melalui jalur ilegal. Banyak yang tidak tahu atau tidak mampu untuk menjadi TKI melalui jalur legal. Para calon TKI perlu mengetahui bagaimana caranya menjadi TKI yang sah. Calo TKI banyak beroperasi di TTS. Mereka menggunakan berbagai pendekatan untuk membujuk orang agar mau menjadi TKI, seperti dijanjikan gaji besar, dan keluarga yang ditinggalkan diberi uang. Calo TKI sering melakukan pendekatan dari figur laki-laki seperti bapak atau om yang

secara budaya memiliki kekuatan dalam mengambil keputusan keluarga. Mereka mendukung pengiriman TKI dari TTS melalui cara yang illegal. Banyak perempuan TTS dijadikan komoditas ekonomi untuk mendapatkan penghasilan keluarga.

Kekerasan fisik juga banyak terjadi di TTS. Salah satu faktornya adalah budaya; ada persepsi bahwa orang Timor ketika sudah menikah, maka istri menjadi "hak suami". Dalam arti sering kali segala keputusan yang diambil istri harus melalui suami. Di Soe, ibukota TTS, sendiri sudah ada beberapa jejaring lembaga swadaya seperti Sanggar Suara Perempuan (SSP) dan Rumah Perempuan yang mengadvokasi masyarakat mengenai hak-hak perempuan. SSP bersama Lembaga Bantuan Hukum (LBH) juga bekerjasama untuk memberikan pendampingan hukum bagi para penyintas kekerasan domestik. Namun, jumlah kekerasan terhadap perempuan masih tergolong tinggi. Ada persepsi di masyarakat bahwa ketika suami sudah melunasi maharnya, maka sepenuhnya istri menjadi hak suami. Sering dijumpai di masyarakat mengenai kasus kekerasan dalam rumah tangga, namun tetangga sekitar rumah tidak bisa berbuat banyak karena hal itu sudah dipersepsikan sebagai hak suami.

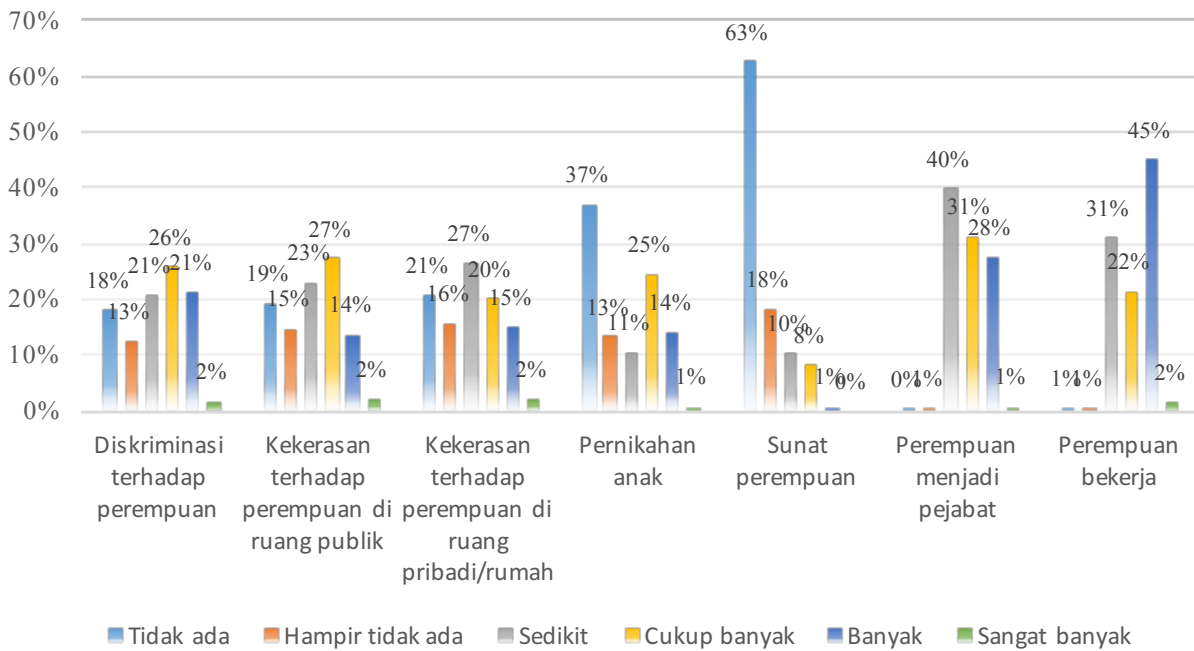
Pernikahan dibawah umur juga masih banyak terjadi di TTS. Ada persepsi bahwa ketika laki-laki sudah bisa bekerja di kebun dan perempuan sudah bisa menenun maka mereka sudah dianggap pantas menikah. Kasus pernikahan dibawah umur sering terjadi karena "kecelakaan".

Di bidang politik, masih sangat sedikit perempuan yang terlibat. Sampai akhir 2017, jumlah perempuan di DPRD kabupaten hanya 2 orang dan di provinsi hanya 4 orang. Jumlah perempuan yang bekerja di sector formal tidak sampai 30%. Kepemimpinan perempuan tidak ada dalam budaya di Timor. Ruang publik bukanlah ruang perempuan. Mereka hanya boleh beraktivitas di ruang domestik.

Angka buta huruf perempuan di Soe cukup tinggi. Sementara angka partisipasi kerja perempuan rendah. Walaupun ditemukan fakta bahwa perempuan lebih berprestasi di sekolah tetapi ketika keluarga tidak memiliki uang yang cukup, prioritas sekolah jatuh pada anak laki-laki. Ketika perempuan bersekolah dan memiliki pasangan yang tingkat pendidikannya setara atau lebih, biasanya perempuan lebih dianjurkan untuk tinggal dirumah mengurus keluarga. Sulit mengaktualisasikan diri di luar rumah.

Proporsi hak perempuan dalam menentukan pilihan-pilihan hidupnya cukup kecil. Anak harus patuh pada pilihan yang ditentukan orang tua. Pembagian peran gender dapat dilihat dari bangunan orang Timor. Mereka membagi rumah menjadi rumah laki-laki yang biasa disebut Lopo. Rumah perempuan disebut Bubu. Dari struktur bangunan dapat ditarik kesimpulan bahwa rumah laki-laki adalah ruang public sedangkan rumah perempuan merupakan ruang domestik. Dalam keluarga perempuan tidak bisa memiliki asset. Perempuan hanya mengelola asset saja.

Grafik 11. Jenis Diskriminasi terhadap Perempuan di Kabupaten TTS

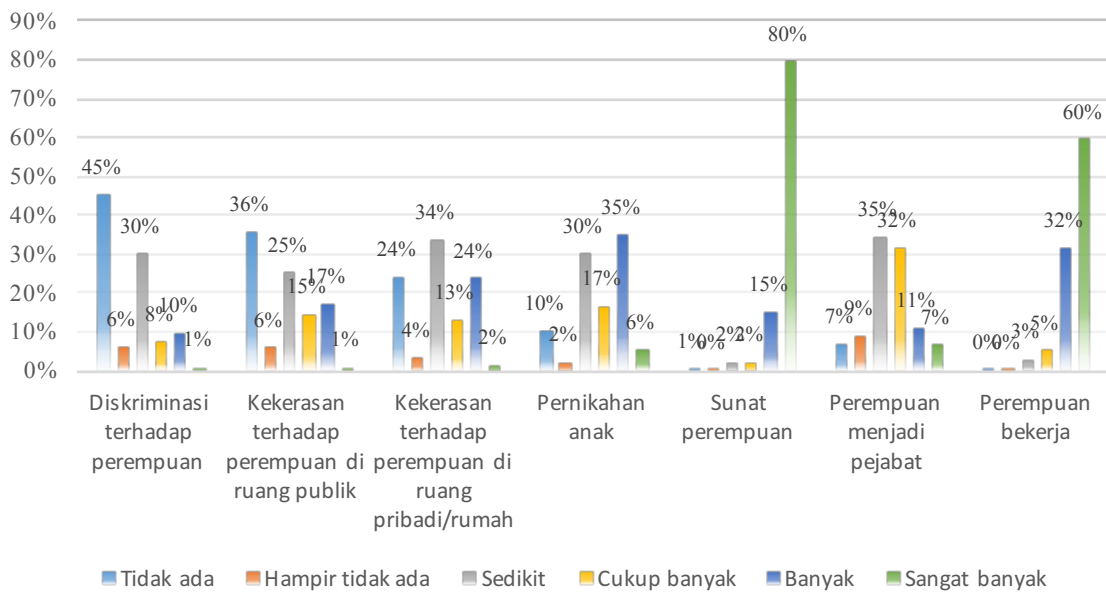


Di Kabupaten Dompu permasalahan kesetaraan gender di daerah ini sudah terbilang cukup baik. Anak perempuan dan anak laki-laki memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang tinggi. Selain itu dalam hal pekerjaan pun perempuan sudah banyak mengisi kegiatan perekonomian. Mereka membantu suaminya di ladang, berjualan di pasar, hingga menjadi Aparatur Sipil Negara. Namun, belum banyak perempuan yang menduduki jabatan strategis didalam pekerjaannya. Tercatat hanya ada 2 anggota dewan yang berjenis kelamin perempuan dan tidak ada perempuan yang menjabat sebagai kepala dinas sampai akhi 2017.

Selain itu, angka kekerasan terhadap perempuan mengkhawatirkan. Faktor ekonomi seringkali memicu pertikaian pada suami-istri hingga tidak jarang berujung kepada perilaku kekerasan terhadap perempuan. Tidak sedikit perempuan yang akhirnya memilih untuk menjadi TKI keluar negeri karena sudah tidak tahan lagi dengan perilaku kekerasan yang mereka alami. Menurut warga, cukup banyak terjadi kasus kekerasan kepada perempuan dan kasus kekerasan yang melibatkan anak. Rata-rata korban enggan melapor karena bagi mereka pernikahan dan anak merupakan hal yang penting.

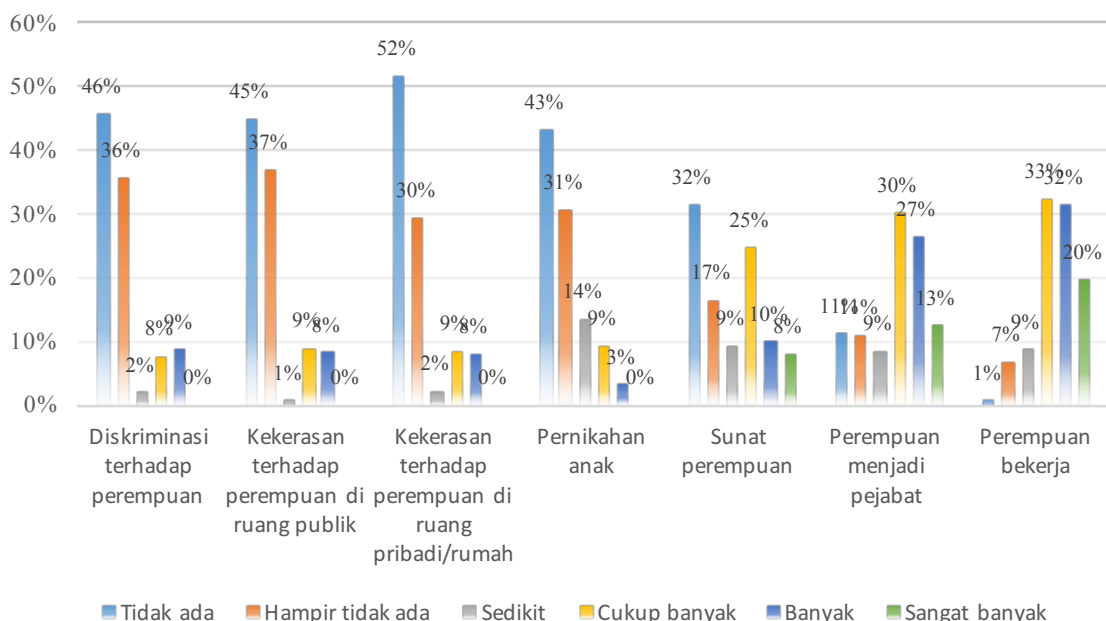
Hingga awal 2018, masih banyak kasus kriminal yang melibatkan anak-anak. Mereka biasanya disuruh oleh orang dewasa untuk melakukan tindakan kriminal dikarenakan adanya informasi bahwa anak apabila tertangkap hukumannya akan lebih rendah. Kekerasan dalam rumah tangga masih ada dalam kehidupan warga Dompu. Warga Dompu menyatakan bahwa pernikahan dan anak merupakan faktor utama yang akhirnya membuat mereka mau untuk bertahan.

Grafik 12. Jenis Diskriminasi terhadap perempuan di Kabupaten Dompu



Di Dompu, masih ada masalah kesetaraan gender. Masalah yang cukup menonjol, adalah pernikahan anak perempuan di bawah umur. Praktik pernikahan anak perempuan di bawah umur di antara masyarakat kepulauan di Pangkep, termasuk Pulau Sabutung, adalah hal yang dianggap lumrah oleh masyarakat. Masyarakat beranggapan bahwa hal itu bukan hal yang harus dipermasalahkan. Pada tahap-tahap tertentu, bahkan orang tua si anak perempuan beranggapan bahwa menikahkan anak perempuannya sesegera mungkin, dapat membantu membebaskan mereka dari jeratan masalah ekonomi. Kasus pernikahan anak perempuan di bawah umur yang masih marak ini adalah masalah yang cukup sulit diatasi oleh Pemda Pangkep karena berbenturan dengan keyakinan dan budaya masyarakat. Di beberapa desa saat ini, aturan pelarangan praktik pernikahan anak dibawah umur tidak diberlakukan lagi.

Grafik 13. Jenis Diskriminasi terhadap perempuan di Kabupaten Pangkep



BAB 5

Kesimpulan dan Rekomendasi

5.1. Kesimpulan

1. Tim pelaksana pencapaian TPB di Indonesia sudah terbentuk dan sedang dalam proses menjalankan tugas-tugasnya sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
2. Secara umum, program sosial yang ada di Indonesia belum memadai untuk mendukung pencapaian TPB. Pemerintah daerah dan Pemerintah Nasional masih dinilai belum melakukan langkah-langkah yang cukup untuk membantu warga miskin, menyediakan pekerjaan, membantu perempuan, dan membantu dalam menjalankan usaha.
3. Pemerintah daerah Kabupaten Pangkep sudah memulai persiapan pencapaian TPB, bahkan sudah menyediakan anggarannya dalam APBD dan sudah menjalankan beberapa program yang sejalan dengan pencapaian TPB dua tahun terakhir. Hasilnya, terjadi perubahan cukup signifikan pada penurunan ketimpangan, status kemiskinan, dan ketimpangan gender.
4. Masih seperti tahun 2017, Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu dan Kabupaten Timor Tengah Selatan belum memulai persiapan pencapaian TPB, dan belum menyediakan anggarannya dalam APBD.
5. Secara umum, program-program sosial yang diselenggarakan di Kabupaten Dompu dan Kabupaten Timor Tengah Selatan belum mendukung secara signifikan pencapaian TPB.
6. Status kemiskinan yang terburuk ada di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Penghasilan kebanyakan warganya lebih kecil dari UMP dan biaya yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar.
7. Dari tiga kabupaten yang diteliti, ketimpangan ekonomi yang paling tinggi terjadi di Kabupaten Timor Tengah Selatan, disusul oleh Kabupaten Dompu.

8. Dari tiga kabupaten yang diteliti, ketimpangan gender yang paling tinggi terjadi di Kabupaten Timor Tengah Selatan, disusul oleh Kabupaten Dompu.
9. Bentuk ketimpangan gender dan diskriminasi terhadap perempuan yang masih berlangsung adalah tindak kekerasan terhadap perempuan di ruang publik dan privat, eksploitasi perempuan, pernikahan paksa dan pernikahan anak/di bawah umur, dan sedikitnya perempuan yang menduduki jabatan publik.

5.2. Rekomendasi

Masih seperti yang diajukan pada 2017, Infid merekomendasi pokok-pokok usulan berikut ini untuk dijalankan oleh Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah guna meningkatkan kesiapan pencapaian TPB.

1. Pemerintah Indonesia harus melibatkan masyarakat untuk ikut serta dalam menyebarkan SDGs atau TPB. Kampanye besar TPB perlu dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan banyak warga. Kampanye itu perlu dilakukan oleh Pemerintah Indonesia di tingkat nasional, provinsi, kota/kabupaten, hingga kecamatan. Kampanye itu bertujuan memberikan pemahaman mengenai pentingnya Indonesia menjalankan SDGs karena masih banyak pihak di antara para pemangku-kepentingan yang memandang SDGs sebatas agenda internasional yang terpisah dengan dengan pembangunan nasional dan daerah.
2. Sosialisasi SDGs sebagai cara yang dapat didayagunakan sebagai kerangka kerja dan alat bantu untuk mengakselerasi capaian dan mempertanggungjawabkan hasil-hasil pembangunan nasional dan daerah.
3. Pencapaian TPB perlu didorong melalui kerjasama multi stake holders serta sinergi dari berbagai pemangku kepentingan mencakup pihak pemerintah nasional, pemerintah daerah, perguruan tinggi, sektor swasta/dunia usaha, CSO, ormas, dan kelompok masyarakat lainnya. Semua pemangku kepentingan ini perlu mengadopsi mindset atau “pola pikir baru” yang menerima keseimbangan yang lebih adil antara risiko dan imbalan dalam menjalankan program dan bekerja sama dalam jangka panjang.
4. Tindakan yang lebih terpadu di tingkat lokal diperlukan untuk menjalankan program yang benar-benar berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan, perluasan dampak melalui pengembangan praktik terbaik, serta template atau standar proyek, dan melakukan peningkatan kapasitas efektif sehingga program itu dapat dilaksanakan secara efektif.
5. Pasca-infrastruktur, fokus pembangunan perlu diarahkan pada pembangunan manusia dan kesejahteraan sosial.

6. Lakukan analisis kebutuhan program sosial terkait dengan pencapaian TPB untuk menentukan program apa yang perlu dilaksanakan dan bagaimana pelaksanaannya oleh Pemerintah Indonesia, baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota.
7. Standarisasi pelaksanaan program sosial, mencakup di antaranya prosedur operasional, durasi, frekuensi, besaran bantuan, proses pemberian bantuan, target penerima bantuan, pelaksana program, serta aktivitas pemantauan dan evaluasi.
8. Meningkatkan bimbingan dan upaya lainnya untuk meningkatkan jumlah perempuan dalam pekerjaan laki-laki dan posisi kepemimpinan politik dengan memberi penekanan khusus pada daerah-daerah yang ketimpangannya gendernya masih tergolong tinggi.
9. Memulihkan dan memberikan penekanan yang lebih atas pembangunan sumber daya manusia dan ketenagakerjaan
10. Realokasi dana 5-10% untuk meningkatkan investasi SDM perempuan dari anggaran pendidikan di APBN dengan memberi penekanan khusus pada daerah-daerah yang ketimpangannya ekonominya masih tergolong tinggi.
11. Memastikan menyempitnya kesenjangan antara daerah dalam pembangunan manusia dan memberikan kesempatan yang lebih besar untuk meningkatkan kualitas SDM bagi an kelompok masyarakat miskin.
12. Memperbaharui kebijakan pajak di Indonesia, sesuai dengan potensi ekonomi Indonesia dan prinsip pembagian beban dan manfaat yang adil.
13. Perbaiki Undang-Undang Perpajakan agar dapat mengakomodasi potensi pendapatan pajak dan realitas kekayaan kelompok super kaya Indonesia.
14. Pemantauan dan evaluasi sistematis pelaksanaan program-program pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan sosial (termasuk ketimpangan gender) secara komprehensif. Pemantauan dan evaluasi ini dilakukan mulai dari perencanaan hingga pengukuran hasil dan dampak. Evaluasi tidak hanya dilakukan pada akhir pelaksanaan program, melainkan perlu dilakukan dalam keseluruhan rentang pelaksanaan program, sejak awal, pertengahan hingga akhir program sehingga selain dapat menjadi masukan bagi pelaksanaan program berikutnya, juga menjadi dasar untuk perbaikan program yang sedang berlangsung.



NGO in Special Consultative Status
with the Economic and Social Council of the United Nations, Ref. No: D1035

Jl. Jatipadang Raya Kav.3 No.105 Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 12540
021 7819734, 7819735 | info@infid.org | www.infid.org

Follow Us:

